

**Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kesehatan Terhadap Jumlah
Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (Perbandingan
Antara PDRB Perkapita Dengan Pendapatan Per Pekerja)**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Adinda Erdiana
Nomor Mahasiswa : 17313073
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

2021

**Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kesehatan Terhadap Jumlah
Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (Perbandingan
Antara PDRB Perkapita Dengan Pendapatan Per Pekerja)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Adinda Erdiana
Nomor Mahasiswa : 17313073
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI

2021



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Maret 2021



Penulis,

Adinda Erdiana



PENGESAHAN

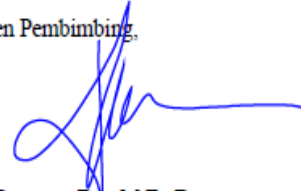
Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (Perbandingan Antara PDRB Perkapita Dengan
Pendapatan Per Pekerja)

Nama : Adinda Erdiana
Nomor Mahasiswa : 17313073
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 1 Maret 2021

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN KESEHATAN TERHADAP
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2013
(PERBANDINGAN ANTARA PDRB PERKAPITA DENGAN PENDAPATAN PER
PEKERJA)**

Disusun Oleh : **ADINDA ERDIANA**

Nomor Mahasiswa : **17313073**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 08 April 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.**

Penguji : **Akhsyim Afandi, Drs., MA.Ec., Ph.D.**



.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3)

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan".

(HR Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah berjuang agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan saya hingga sampai jenjang sarjana. Semoga dengan adanya skripsi ini bisa membuat kedua orang tua saya bangga. Serta terimakasih atas doa-doa yang telah dipanjatkan untuk saya, dari seluruh keluarga dan teman-teman saya yang selalu memberi doa, dukungan dan bantuannya kepada saya saat saya membutuhkan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT serta junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (Perbandingan Antara PDRB Perkapita Dengan Pendapatan Per Pekerja)”. Bersama dengan terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena hal tersebut, penulis dalam kesempatan ini mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pembuka Rahmat dan Maha Penolong.
2. Kedua orang tua penulis, yakni Bapak Sutriono Hadi dan Ibu Erni Pujiwati yang telah bekerja keras dapat menyekolahkan penulis hingga mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkahi oleh Allah SWT.
3. Bapak Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev, selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih atas bimbingan yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Nuryana Nur Hasanah dan Ramadhaniyah Sekarningrum. Terimakasih atas bantuan selama bimbingan tugas akhir.
5. Evania Friza Azhar, Nadiah Vitha, Nabila Cahita dan Titi Nur Rachmah. Terimakasih telah membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang diperlukan untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Apabila terdapat kesalahan materi yang terdapat dalam tugas akhir ini, penulis mohon maaf. Dan penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 3 Maret 2021



Adinda Erdiana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17

2.1.1 Pengertian Kemiskinan	17
2.1.2 Penyebab Kemiskinan	19
2.1.3 Ukuran Kemiskinan	21
2.1.4 Indikator Kemiskinan	23
2.1.5 Teori Rantai Kemiskinan	26
2.1.6 Pendidikan	28
2.1.7 PDRB	31
2.1.8 Kesehatan	34
2.1.9 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Jumlah Penduduk Miskin	36
2.1.10 Hubungan PDRB Per kapita dan Jumlah Penduduk Miskin	38
2.1.11 Hubungan Kesehatan dengan Jumlah Penduduk Miskin	39
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran	45
2.4 Hipotesis Penelitian	48
BAB III	49
METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1 Jenis dan Sumber Data	49
3.2 Metode Pengumpulan Data	50
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
3.3.1 Variabel Penelitian	51
3.3.2 Definisi Operasional	51
3.4 Metode Penelitian	52
3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel	57
3.5 Uji Signifikansi	61
3.5.1 Koefisien Determinan (R^2)	61
3.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	63
3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (uji Statistik t)	63
BAB IV	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	65
4.1.1 Wialyah penelitian	65
4.1.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	65
4.1.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah	66
4.1.2 Variabel Penelitian	68
4.1.2.1 Jumlah Penduduk Miskin	68
4.1.2.2 Angka Melek Huruf	71
4.1.2.3 PDRB Perkapita	75
4.1.2.4 Pendapatan per pekerja	78
4.1.2.5 Akses Sumber Air Minum Layak	82

4.2 Analisis Data	86
4.2.1 Regresi Data Yang Menggunakan PDRB Perkapita	86
4.2.1.1 Hasil Regresi Model Common, Fixed dan Random Effect	86
4.2.1.2 Pemilihan Model Yang Tepat	89
4.2.1.2.1 Uji Chow	89
4.2.1.2.2 Uji Langrange Multiplier	90
4.2.1.2.3 Uji Haustman	91
4.2.1.3 Uji Statistika dengan Model Fixed Effect	92
4.2.1.4 Hasil Regresi Fixed Effect	92
4.2.2 Regresi Data Yang Menggunakan Pendapatan Per Pekerja	95
4.2.2.1 Hasil Regresi Model Common, Fixed dan Random Effect	95
4.2.2.2 Pemilihan Model Yang Tepat	98
4.2.2.2.1 Uji Chow	98
4.2.2.2.2 Uji Langrange Multiplier	99
4.2.2.2.3 Uji Haustman	100
4.2.2.2.4 Uji Statistika dengan Model Fixed Effect	101
4.2.2.2.5 Hasil Regresi Fixed Effect	101
4.3 Pembahasan	104
4.3.1 Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin	104
4.3.2 PDRB dan Jumlah Penduduk Miskin	106
4.3.3 Kesehatan dan Jumlah Penduduk Miskin	107
4.3.4 Perbandingan Antara Persamaan Y1 dengan Y2	108
BAB V	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 – 2013	69
Tabel 4.2 Angka Melek Huruf umur 15 Tahun ke atas di Jawa Tengah Tahun 2017–2013	72
Tabel 4.3 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017– 2013	75
Tabel 4. 4 Pendapatan Per Pekerja Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2007 – 2013	79
Tabel 4.5 Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 – 2013	83
Tabel 4.7 Hasil Regresi Common Effect (PDRB Perkapita)	86
Tabel 4.8 Hasil Regresi Fixed Effect (PDRB Perkapita)	87
Tabel 4.9 Hasil Regresi Random Effect (PDRB Perkapita)	88
Tabel 4.10 Uji Chow (PDRB Perkapita)	89
Tabel 4.11 Uji Langrange Multiplier (PDRB Perkapita)	90
Tabel 4.12 Uji Haustman (PDRB Perkapita)	91
Tabel 4. 13 Hasil Regresi Common Effect (Pendapatan Per Pekerja)	95
Tabel 4.14 Hasil Regresi Fixed Effect (Pendapatan Per Pekerja)	96
Tabel 4.15 Hasil Regresi Random Effect (Pendapatan Per Pekerja)	97
Tabel 4.16 Uji Chow (Pendapatan Per Pekerja)	98
Tabel 4.17 Uji Langrange Multiplier (Pendapatan Per Pekerja)	99

Tabel 4.18 Uji Haustman (PDRB Perkapita) 100



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2014 – 2019	2
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019 (Ribu Jiwa)	4
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Ribu Jiwa)	5
Gambar 1.4 PDRB Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Juta Rupiah)	7
Gambar 1.5 Angka Melek Huruf umur 15 Tahun keatas di Jawa Tengah Tahun 2017 (Persen)	8
Gambar 1.6 Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Persen)	9
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Nurkse	27
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran I. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019.....	121
Lampiran II. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	122
Lampiran III. PDRB (Juta Rupiah) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	123
Lampiran IV. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun Keatas (Persen) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	124
Lampiran V. Akses Sumber Air Minum Layak (Persen) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	126
Lampiran VI. PDRB Non Migas Berdasarkan Harga Konstan Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2013.....	127
Lampiran VII. Jumlah Penduduk (Jiwa) Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2013.....	129
Lampiran VIII. Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja (Jiwa) Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2013.....	130

ABSTRAK

Pembangunan yang telah dijalankan di negara Indonesia masih belum mencapai tahap yang optimal, hal ini dikarenakan masih tidak meratanya pembangunan di seluruh bagian Indonesia baik pada perkotaan dan pedesaan yang dapat memunculkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut salah satunya adalah meningkatnya kemiskinan di daerah tertentu atau adanya disparitas. Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kedua dengan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendidikan (Angka Melek Huruf), PDRB (PDRB per kapita dan Pendapatan per pekerja) dan kesehatan (Akses Sumber Air Minum Layak) terhadap jumlah penduduk miskin dengan menggunakan metode regresi data panel dengan rentan waktu 2007-2013 yang melibatkan 35 Kabupaten/Kota. Berdasarkan dari hasil penelitian, model yang paling tepat digunakan adalah regresi model fixed effect dengan hasil semua variabel berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin baik secara parsial maupun bersama-sama. Jika ditinjau dari R^2 nya, Pendapatan per pekerja memiliki signifikansi lebih besar daripada PDRB per kapita, dimana R^2 pada pendapatan per pekerja sebesar 96,54% dan pada PDRB per kapita sebesar 98,48%. Hal tersebut dikarenakan PDRB yang digunakan penulis merupakan PDRB Non Migas, yang merupakan gambaran murni pendapatan yang diterima para pekerja, sehingga Pendapatan per pekerja lebih dapat menggambarkan pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Kata Kunci : *jumlah penduduk miskin, angka melek huruf umur 15 ke atas, PDRB perkapita, Pendapatan per pekerja, akses sumber air minum layak.*

BAB I

PENDAHULUAN

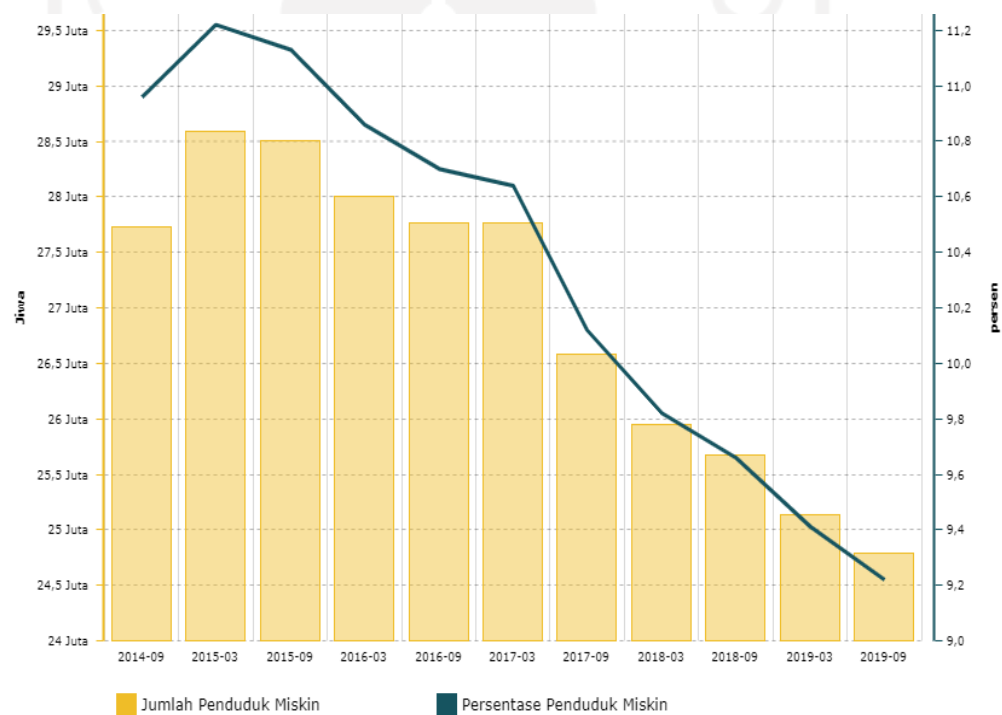
1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tolak ukur keberhasilannya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan kesenjangan pendapatan penduduk antar daerah maupun sector. Menurut Todaro, 2000:20, pembangunan dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan namun juga menghapus atau mengurangi kemiskinan, kesenjangan masyarakat, dan tingkat pengangguran.

Berdasarkan dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita per hari. Sedangkan menurut tokoh lain bernama Friedman, kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial contoh berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang dapat dipengaruhi oleh macam-macam factor seperti tingkat pendapatan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan.

Kemiskinan memiliki dampak negative terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, dimana semakin tinggi kemiskinan maka biaya yang harus dikeluarkan dalam pembangunan ekonomi akan semakin tinggi pula, hal ini jelas akan menghambat pembangunan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa angka persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan berturut-turut dari bulan September tahun 2015 sampai dengan bulan September 2019. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.



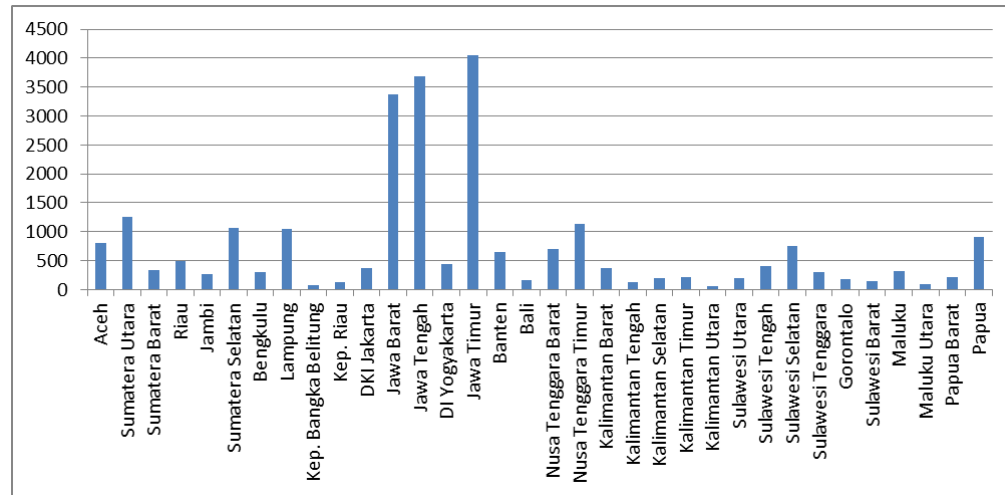
Sumber : Katadata.co.id

Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2014-2019.

Pada Gambar Grafik 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa walaupun pada bulan Maret 2015 terdapat kenaikan jumlah penduduk miskin yang dikarenakan adanya kebijakan pencabutan subsidi BBM (<https://databoks.katadata.co.id/>), pada 2015 sampai dengan bulan September 2019 secara bertahap mengalami penurunan sebanyak 3.7 juta penduduk miskin dari 28.5 juta menjadi 24.8 juta penduduk miskin. Dan pada presentase penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 2.08% dari 11.3% menjadi 9.22%.

Secara umum, usaha pengentasan kemiskinan ini akan diarahkan pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi dan selama ini pemabngunan ekonomi di Indonesia cenderung berfokus pada daerah pusat seperti Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Berikut adalah rincian gambar jumlah penduduk miskin menurut di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2019 :



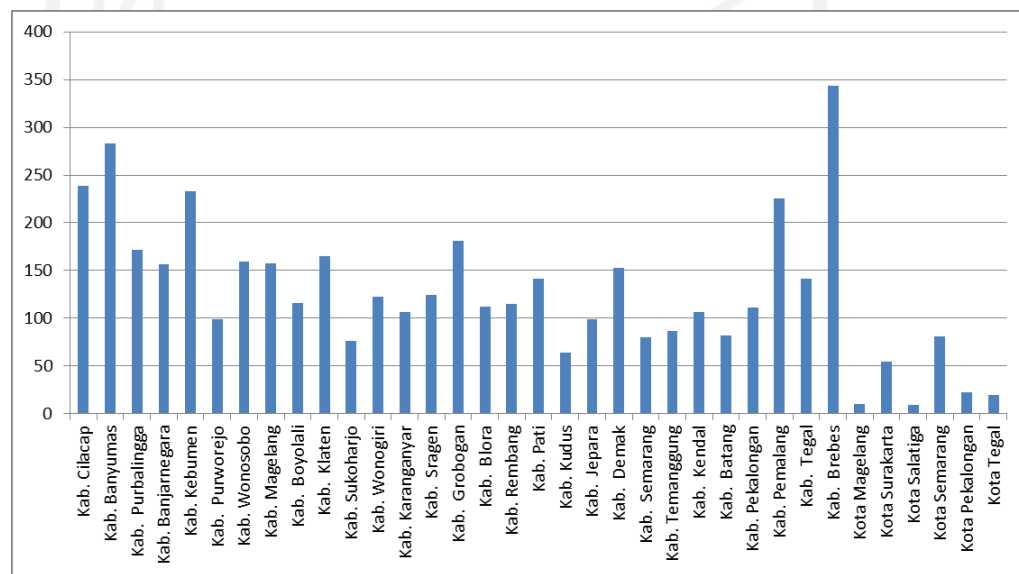
Sumber : Diolah dari data Badan Pusat Statistika (BPS)

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2019
(Ribuan Jiwa)

Pada Gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Timur berada di peringkat ke satu, lalu provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat kedua, dan terakhir provinsi Jawa Barat berada di peringkat ketiga. Berdasarkan data BPS, penurunan angka kemiskinan di provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di seluruh dunia dimana pada Maret-September 2019 turun dari 3,74 juta menjadi 3,68 juta orang sehingga sebanyak 63,830 penduduk miskin di Jawa Tengah berhasil lepas dari garis kemiskinan yang kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Timur dengan penurunan angka kemiskinan sebanyak 56.250 jiwa dan di susul oleh Nusa Tenggara Barat sebanyak 30.280 jiwa. Menurut

Shandy Jannifer, Pengamat Ekonomi dari Unika Soegijapranata Semarang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 50 persen dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.

Berikut merupakan gambar rincian jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2019.



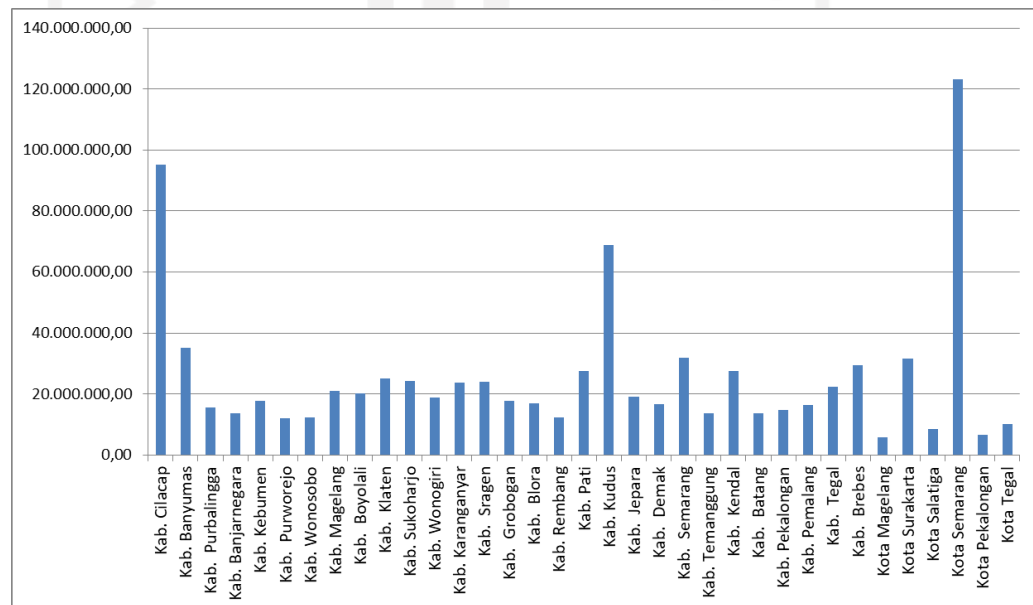
Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 (Ribu Jiwa)

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa wilayah di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas dan yang terakhir Kabupaten Cilacap di tahun 2017. Menurut Nurkse (1953), penyebab dari kemiskinan adalah tingkat pendapatan, Pendidikan dan besarnya konsumsi sebagaimana

yang telah dijelaskan di teori lingkaran kemiskinan (Vicious Circle of Poverty). Namun juga terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi kemiskinan dari naik-turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu kualitas sumber daya manusia baik dari bidang Pendidikan maupun kesehatan sebagai modal yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa (Bhargava, 2001; Bloom, 2003; Chandra, 2006; Anggraeni, 2017).

Untuk mengetahui kondisi perekonomian di Jawa Tengah, berikut rincian PDRB di Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017.



Sumber : Badan Pusat Statistika

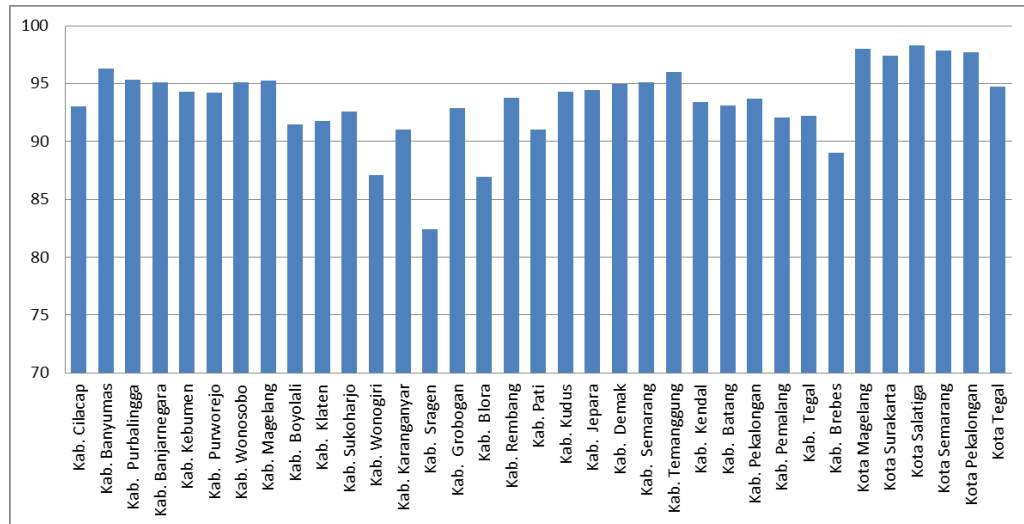
Gambar 1.4 PDRB Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017 (Juta Rupiah)

Dapat dilihat dari Gambar 1.4 diatas bahwa Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus memiliki PDRB tertinggi dari seluruh wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017. Sedangkan wilayah yang memiliki PDRB terendah pada tahun 2017 berada pada wilayah Kota Magelang, Kota Pekalongan dan Kota Salatiga,

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan disparitas pendapatan namun juga berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia adalah untuk memperluas pilihan manusia (enlarging choice) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli (IPM, 2007).

Berikut ini adalah rincian mengenai angka melek huruf di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017.

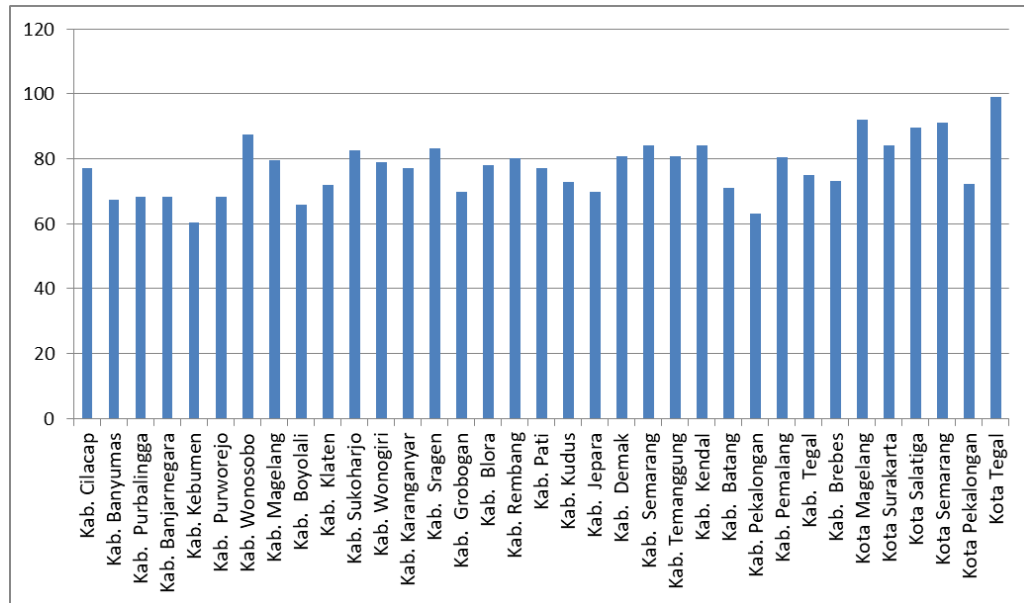


Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.5 Angka Melek Huruf umur 15 Tahun keatas di Jawa Tengah
Tahun 2017 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa angka melek huruf di tahun 2017 pada Kota Salatiga dan Kota Magelang telah menduduki salah satu daerah yang memiliki tingkat angka melek tertinggi di Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Sragen menjadi wilayah dengan nilai angka melek huruf terendah di tahun 2017.

Berikut ini adalah rincian mengenai Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2017.



Sumber : Badan Pusat Statitika

Gambar 1.6 Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.6 diatas terdapat pada tahun 2017, daerah dengan akses sumber air minum layak tertinggi di Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Tegal, Kabupaten Wonosobo dan Kota Magelang. Sedangkan Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Banyumas memiliki nilai presentase terendah di wilayah Jawa Tengah di tahun 2017. Di berbagai literatur ekonomi sudah banyak diungkapkan bahwa tingkat Pendidikan dan jumlah pendapatan merupakan faktor-faktor yang paling fundamental dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan (Arief Daryanto dan Yundi Hafizrianda, 2010). Faktor kesehatan juga telah dibuktikan di beberapa

literature dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana naik-turunnya pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh kondisi kesehatan masyarakat (Syamsul Amar, Alpon Satrianto dan Ariusni; Jurnal Kesehatan Medika Saintika, Vol 10 Nomor 2), sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan juga.

Kemiskinan dan Pendidikan memiliki keterkaitan yang penting karena dengan semakin tingginya tingkat dan kualitas Pendidikan maka pendapatan yang didapat akan ikut meningkat, yang kemudian menyebabkan tumbuhnya perekonomian dan angka kemiskinan menurun. Teori tersebut telah dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006), dimana mereka menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga menyimpulkan bahwa pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan menghasilkan SDM yang baik dan handal. Bukti ini juga dapat dilihat pada hubungan antara table PDRB (Gambar 1.4) dengan Angka Melek Huruf (Gambar 1.5), dimana pada Kabupaten Magelang dengan tingkat angka melek huruf tertinggi kedua di tahun 2017 diantara lainnya memiliki jumlah penduduk miskinnya berada di peringkat kedua terendah dibanding wilayah lainnya (Gambar 1.3).

Pendapatan suatu wilayah dapat diukur dari PDRB. Menurut Badan Pusat Statistik (2009), angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Menurut Thamrin (2001), ia menyatakan bahwa semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah dari pendapatan masyarakat yang diterima. Dengan naiknya pendapatan masyarakat daerah maka jumlah penduduk miskin secara teori akan berkurang dan sebaliknya, sehingga dapat diasumsikan bahwa PDRB memiliki hubungan negative dengan jumlah penduduk miskin. Namun jika dilihat pada table diatas, teori tersebut tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat pada wilayah Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk miskin (Gambar 1.3) yang jauh lebih banyak dibandingkan Kota Magelang dan Salatiga, padahal PDRB (Gambar 1.4) Kota Cilacap jauh lebih besar daripada Kota Magelang dan Salatiga.

Kesehatan masyarakat suatu wilayah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara. Hal ini karena kualitas kesehatan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mempengaruhi produktivitas negara sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Kesehatan masyarakat dapat diukur dari beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup, Akses Sanitasi Layak maupun Akses Sumber Air Minum Layak. Pada penelitian ini penulis menggunakan Akses Sumber Air Minum Layak sebagai indikator kesehatan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap sumber air minum layak sebagai perwujudan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dari pemerintah maka kesehatan masyarakat akan meningkat serta kualitas dan produktivitas masyarakat yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara yang berujung menurunnya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Teori diatas terbukti jika dilihat pada table akses sumber air minum (Gambar 1.6) dengan jumlah penduduk miskin (Gambar 1.3) dimana pada Kota Tegal, memiliki presentase akses sumber air minum layak tertinggi dengan tingkat jumlah penduduk miskin peringkat ketiga terendah diantara wilayah lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai factor-factor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yang dilihat dengan bagaimana pengaruh variabel tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2013. Selain itu pada penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian lain adalah penulis akan membandingkan pengaruh antara PDRB perkapita dengan Pendapatan Per Pekerja untuk melihat mana yang memiliki signifikansi terbesar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Gambar 1.2, angka kemiskinan yang dimiliki provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dimana provinsi Jawa Tengah berada di peringkat kedua tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data penduduk miskin per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah penduduk miskin di antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2017, Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang mempunyai penduduk miskin terbanyak, sedangkan yang mempunyai jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Salatiga. Jika ditinjau dari PDRBnya, Kabupaten Brebes memiliki PDRB lebih besar daripada Kota Salatiga namun PDRB Kabupaten Brebes masih berada di bawah dari batas rata-rata PDRB tahun 2017. Selanjutnya jika ditinjau dari angka melek huruf Kota Salatiga mempunyai angka melek huruf tertinggi kedua. Dan yang terakhir jika ditinjau dari akses sumber air minum layak, Brebes memiliki presentase akses sumber air minum layak yang lebih rendah dari pada Kota Salatiga. Jadi ada kecenderungan angka melek huruf sekolah dan akses sumber air minum layak berhubungan dengan jumlah penduduk miskin, yaitu semakin tinggi jumlah penduduk miskin semakin rendah angka melek huruf sekolah dan akses sumber air minum layak, sedangkan dari sisi PDRB terdapat ketidakcocokan teori dimana seharusnya ketika PDRB nya tinggi maka jumlah penduduk miskin akan rendah bukan sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007-2013?

2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007-2013?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007-2013?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan Kesehatan secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2007-2013?
5. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita dibandingkan dengan Pendapatan Per Pekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2013.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2013.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2013.

4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan Kesehatan secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2013.
5. Mengetahui factor mana yang memiliki signifikansi terbesar diantara PDRB Perkapita dengan Pendapatan Per Pekerja,

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan referensi dalam mempelajari penyebab dari jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai referensi dan masukan untuk mengambil kebijakan public.

1.5 Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu mengenai kemiskinan; landasan teori kemiskinan, pendidikan (Angka Melek Huruf), PDRB

(PDRB per kapita dan Pendapatan per pekerja), dan kesehatan (Akses Sumber Air Minum Layak); hipotesis; serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan metode analisis berupa pendekatan model regresi data panel serta membahas mengenai uji statistik yang meliputi koefisien determinasi, uji parsial (uji t), dan uji bersama-sama (uji f).

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu hasil dari pemilihan model dalam regresi data panel, hasil analisis koefisien determinasi, hasil analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dan hasil analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Berdasarkan hasil pemikiran dari tokoh yang bernama Friedman, kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketidaksamaan kesempatan dalam memformulasikan kekuasaan sosial yang contohnya berupa asset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi. Sedangkan menurut Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) kemiskinan merupakan sesuatu konsep yang memiliki dimensi kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif, kondisi seseorang menjadi miskin yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan atau disparitas pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, kondisi dimana seseorang menjadi miskin dikarenakan adanya pola sikap seseorang atau masyarakat yang seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar yang disebabkan oleh faktor budaya.
- d. Kemiskinan struktural, kondisi seseorang menjadi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses seseorang terhadap sumber daya karena dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan dan justru seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selain bentuk-bentuk diatas, Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat

tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006), dari segi ekonomi, terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan yang terdiri dari pertama adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi atau disparitas pendapatan yang timpang dengan penduduk miskin yang biasanya hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah, kedua adanya perbedaan kualitas SDM yang mengakibatkan produktivitasnya rendah sehingga upahnya turut rendah, ketiga karena adanya perbedaan akses dalam modal.

Kemudian berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan disebabkan karena adanya pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan dan pelosok, lalu penyebab yang lain adalah pelayanan dan fasilitas dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi serta transportasi) yang belum dapat dijangkau masyarakat miskin. Hal tersebut menyebabkan rentannya pelayanan bantuan social (penyandang cacat, lanjut usia dan yatim piatu), cakupan jaminan social, dan cakupan perlindungan social yang dimiliki masyarakat miskin masih tidak memadai.

Lalu menurut dari BPS (2008), faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu faktor internal dan eksternal, dimana factor internalnya berupa kepemilikan aset tempat tinggal (luas bangunan, jenis lantai & dinding) fasilitas sanitasi dan sumber air minum, sumber penerangan, fasilitas pangan, sejumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi, sedangkan pada faktor eksternal berupa keberadaan balita, anak usia sekolah, kesertaan KB, dan penerima kredit usaha (UMKM). Sedangkan menurut Widodo (2006), Kemiskinan disebabkan oleh:

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki.
- b. Rendahnya derajat kesehatan, yang hal ini dapat menyebabkan masyarakat memiliki daya tahan tubuh, daya piker dan prakarsa yang rendah juga.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Dengan lebih banyaknya penduduk usia kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia maka masyarakat tersebut akan memiliki probabilitas menjadi pengangguran cukup besar.
- d. Kondisi terisolasian, ketika pemerataan pembangun belum menyebar secara menyeluruh hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di

tempat terpencil dan terisolasi akan mengalami kesulitan dalam menjangkau fasilitas-fasilitas dan pelayanan kesehatan pembangunan yang dinikmati masyarakat lainnya.

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Menurut Arsyad (1999 :238), kemiskinan dapat diukur dengan kemiskinan absolute dan kemiskinan relative.

a. Kemiskinan Absolute

Kemiskinan absolute adalah kemiskinan yang diukur dengan cara membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat pendapatan minimum ini merupakan pembatas atau garis yang membedakan orang miskin dan tidak.

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. Berdasarkan kriteria dari United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD), ia menggolongkan kebutuhan dasar manusia menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan;

2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (leisure), dan rekreasi serta ketenangan hidup; dan
3. Kebutuhan untuk memiliki kelebihan pendapatan demi mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Namun pada kemiskinan absolute terdapat kekurangan yaitu, sulitnya menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, namun juga dapat dipengaruhi oleh unsur tingkat kemajuan suatu negara, iklim, serta factor-faktor ekonomi lainnya.

b. Kemiskinan Relative

Kemiskinan relative merupakan kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh karena kebijakan pembangunan yang telah diterapkan negara belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan atau disparitas distribusi pendapatan.

Menurut Kincaid (1975), Semakin besar adanya ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Berdasarkan kriteria *World Bank*, kemiskinan dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Pembagian Pendapatan Sangat Timpang : ketika 40% dari jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari pendapatan nasional,
2. Ketidakmerataan Sedang : ketika 40% dari jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17% dari pendapatan nasional,
3. Ketidakmerataan Rendah : 40% dari jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17% dari pendapatan nasional.

2.1.4 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan dari Thorbecke (Suharno, 2008) indicator kemiskinan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Headcount Index, merupakan nilai indeks yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk suatu daerah. Sehingga semakin kecil headcount index maka semakin berkurang juga jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya bila headcount indexnya semakin besar maka menunjukkan jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan semakin tinggi juga.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index, merupakan indeks yang digunakan sebagai alat ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan atau dengan kata lain kehidupan penduduk miskin semakin terpuruk.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan atau Poverty Severity Index, untuk memberikan gambaran penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Sehingga ketika nilai indeks keparahan semakin tinggi maka semakin tinggi pula angka ketimpangan pengeluaran pada penduduk miskin.

Lalu menurut Arsyad Arsyad, 1999:240) indicator kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Tingkat Konsumsi Beras

Berdasarkan dari pemikiran Sajogyo (1977), tingkat konsumsi beras perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Untuk daerah perdesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg perkapita pertahun bias digolongkan

miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan, penduduk digolongkan miskin jika konsumsi beras kurang dari 360 kg perkapita pertahun.

2. Tingkat Pendapatan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang garis kemiskinan merupakan batasan untuk menentukan apakah seseorang tergolong masuk kategori penduduk miskin atau tidak. Menurut *World Bank*, standar kemiskinan itu didasarkan pada pendapatan per kapita, dimana penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin.

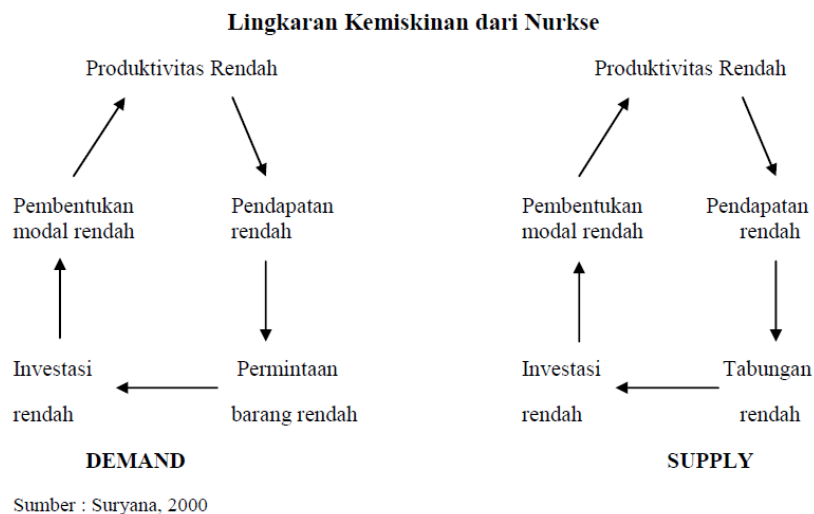
3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Menurut buku yang dipublikasi oleh UN (1961) berjudul “International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide”, terdapat sembilan komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, pendidikan, konsumsi makanan dan gizi, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, rekreasi, sandang dan kebebasan.

2.1.5 Teori Rantai Kemiskinan

Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Ketika seseorang memiliki keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal maka akan menyebabkan rendahnya produktifitas orang tersebut. Rendahnya produktifitas yang didapat akan mengakibatkan pendapatan yang mereka terima juga rendah. Kemudian dengan rendahnya pendapatan yang didapat maka akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang dimiliki, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Dan rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Teori tersebut dikemukakan oleh tokoh bernama Ragnar Nurkse 1953 yang menyatakan “a poor country is a poor because it is poor” yang diartikan menjadi “negara miskin itu miskin karena negara tersebut miskin”.

Nurkse menjelaskan bahwa terdapat dua lingkaran perangkap kemiskinan yang berupa :



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Nurkse

Dari segi penawaran (supply) tingkat pendapatan rendah yang diperoleh masyarakat diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah sehingga karena kemampuan untuk menabung rendah maka tingkat pembentukan modal masyarakat juga rendah. Dengan tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah tersebut menyebabkan kekurangan modal, sehingga tingkat produktivitas yang dihasilkan juga rendah dan seterusnya.

Dari segi permintaan (demand), negara-negara yang miskin memiliki penanaman modal yang sangat rendah, karena luas pasar yang dimiliki negara miskin untuk berbagai jenis barang adanya terbatas yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat. Sedangkan rendah nya pendapatan masyarakat itu disebabkan karena tingkat produktivitas yang rendah yang

merupakan wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Sehingga pembentukan modal yang terbatas tersebut akan menyebabkan kekurangan dorongan untuk menanamkan modal dan seterusnya.

2.1.6 Pendidikan

Pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), GBHN 1999-2004, arah kebijakan pembangunan pada Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengusahakan perluasan dan pemerataan kesempatan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi guna untuk menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- 2) Memajukan kualitas Pendidikan pada sektor kemampuan akademik dan professional dan serta serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan agar para tenaga pendidik mampu untuk menjalankan tugas secara optimal terutama pada pembentukan watak dan budi pekerti sehingga dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- 3) Melaksanakan pembaharuan system pendidikan seperti contohnya pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang

berlaku baik secara nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis Pendidikan secara professional.

- 4) Menggunakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu namun juga sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta sebagai tempat meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan.
- 5) Melaksanakan pembaharuan dan pemantapan system pendidikan nasional yang berdasarkan pada prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- 6) Memajukan kualitas-kualitas pada Lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menstabilkan system pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan berjalannya jaman.
- 7) Memajukan kualitas-kualitas pada sumber daya manusia di Indonesia secepat mungkin yang terarah, terpadu dan menyeluruh dengan menggunakan berbagai upaya proaktif dan reaktif kepada seluruh komponen negara Indonesia agar generasi muda dapat berkembang secara optimal dan disertai dengan hak dukungan serta perlindungan sesuai dengan potensinya.

8) Menaikkan kualitas sumber daya manusia yang termasuk pada bagian penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi yang dimiliki negara Indonesia sendiri baik dalam dunia usaha yang memprioritaskan pada usaha kecil, menengah, serta koperasi agar negara Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk-produk yang berbasis dari sumber daya lokal.

Pada penelitian ini variable yang digunakan sebagai indicator Pendidikan adalah Angka Melek Huruf diatas 15 tahun. Menurut dari Badan Pusat Statistika, tingkatan nilai dari Angka melek huruf itu berkisar antara 0-100 sehingga semakin tinggi Tingkat melek huruf maka menunjukkan bahwa system Pendidikan dasar dan program keaksaraan yang telah diterapkan telah berjalan dengan efektif dan efisien yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

$$AMH 15+ = \frac{a}{b} \times 100\%^1$$

a = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis

b = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

¹ Sirusa, BPS.

2.1.7 PDRB

Menurut Badan Pusat Statistik (2009), angka Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu factor yang dapat menjadi indicator dalam menjelaskan kondisi perekonomian di suatu tempat tertentu. Produk Domestik Regional Bruto menurut BPS dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Pada PDRB memiliki unit-unit produksi yang dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yang terdiri dari ; Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Sektor Gas dan Air Bersih, Sektor Bangunan, Sektor Perdagangan, Sektor Hotel dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan, Sektor Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-jasa lainnya.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan pendapatan, PDRB adalah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu seperti misalnya, upah, gaji, sewa

tanah, bunga modal dan lain-lain. yang sebelumnya telah dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Pada pendekatan ini, PDRB juga mencakup dengan penyusutan neto yang disebut dengan Produk Nasional Netto. Karena PDRB merupakan jumlah semua komponen pendapatan per sector yang disebut sebagai nilai tambah bruto sectoral maka PDRB juga merupakan jumlah dari semua nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pada pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan penambahan dari semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari :

- a. Jumlah konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok.
- e. Ekspor netto.

Lalu sedangkan PDRB perkapita, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) merupakan nilai PDRB yang diperoleh dengan membagikan pada jumlah penduduk dalam suatu periode tertentu atau dapat disajikan dengan rumus dibawah ini :

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{penduduk}}^2$$

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau penduduk satu persatu, sedangkan pada PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Dan pada penelitian ini penulis juga akan menggunakan data PDRB yang dibagi dengan Angkatan kerja yang sedang bekerja untuk dibandingkan dengan PDRB perkapita dan mengetahui factor mana yang lebih signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penulis memilih variable Angkatan kerja yang sedang bekerja sebagai pembanding karena secara logika tidak semua penduduk telah bekerja dan menghasilkan barang atau jasa sedangkan PDRB menurut Badan Pusat Statistika merupakan hasil dari jumlah seluruh nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit-unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Dibawah ini merupakan rumus Pendapatan Per Pekerja yang disajikan sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Per Pekerja} = \frac{PDRB}{\sum \text{Jumlah angkatan kerja yang bekerja}}$$

² Sirusa, BPS.

2.1.8 Kesehatan

Menurut Mils dan Gilson di dalam karya Permana (2012), kesehatan merupakan penerapan teori dan Teknik ilmu ekonomi pada sector kesehatan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a) Akses alokasi-alokasi sumber daya di berbagai upaya kesehatan
- b) Banyaknya jumlah sumber daya yang digunakan pada pelayanan kesehatan
- c) Pengelolaan dan pembiayaan pada berbagai pelayanan kesehatan
- d) Tingkat efisiensi dalam pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya untuk pelayanan kesehatan
- e) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu masyarakat.

Berdasarkan dari pendapat Juanita (2002) kesehatan masyarakat yang baik merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan kesehatan juga perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Contoh dari pembangunan kesehatan adalah seperti proses peningkatan tingkat kesehatan masyarakat dari yang kurang baik menjadi yang sesuai dengan standar kesehatan sehingga dapat membangun kualitas sumber daya manusia sebagai bentuk investasi negara.

Dalam penelitian ini, akses terhadap sumber air minum layak menjadi indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau air yang berasal dari mata air serta sumur yang terlindung, air dari sumur bor atau sumur pompa, yang sarana tersebut memiliki jarak minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Hal tersebut tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air dari sumur dan mata air tidak terlindung. Dengan semakin besarnya akses-akses sumber air minum layak yang dapat digunakan oleh rumah tangga maka akan menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan yang dimiliki penghuni pada rumah tangga di suatu daerah tersebut.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia sangatlah bergantung pada air dan tidak hanya untuk fungsi utamanya sebagai minum, air memiliki fungsi lainnya yaitu mencuci, mandi dan lain sebagainya. Berdasarkan perhitungan WHO (*World Health Organization*), negara berkembang seperti Indonesia setiap harinya memerlukan air sebesar 30-60 liter per orang (Notoatmodjo, 2007).

2.1.9 Hubungan Antara Pendidikan dengan Jumlah Penduduk Miskin

Angka Melek Huruf merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kualitas modal Pendidikan suatu daerah dengan indikasi semakin tinggi angka melek huruf maka modal Pendidikan yang dimiliki akan semakin bagus kualitas Pendidikan yang dimiliki masyarakat daerah tersebut, dan sebaliknya semakin sedikit angka melek huruf yang dimiliki suatu daerah maka semakin buruk kualitas sistem pendidikan dasar efektif yang dimiliki masyarakat daerah tersebut.

Pada pertumbuhan ekonomi negara, jelas bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai pengaruh yang penting dalam meningkatkan produktivitas suatu negara. Berdasarkan pada pemikiran Amartya Sen (2004 : 40), pemasangan kapasitas dalam mengembangkan diri terhadap kemampuan manusia (*human capability*) merupakan salah satu modal besar dalam pembangunan, contohnya pada strategi Timur negara India dan Cina. Dengan Pendidikan yang baik maka setiap orang yang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan akan mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan, dengan demikian Pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial yang kemudian meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga dengan pendapat dari Jeffrey Sachs pada bukunya yang berjudul *The End of Poverty*, dimana ia menyatakan bahwa salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah melalui pengembangan *human capital* terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005 : 245- 265).

Lalu berdasarkan dari penelitian Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), hasil penelitian tersebut membenarkan pernyataan diatas dimana variabel pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus SMP, SMA dan diploma memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin sehingga mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Sesuai dengan teori Amartya Sen, ketika masyarakat memiliki modal pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman dalam mencari pekerjaan maupun untuk mendapat gaji yang lebih baik dengan tingkatan pendidikan yang tinggi. Dengan lebih banyaknya masyarakat yang dapat mendapatkan kerja dan memperoleh gaji yang lebih tinggi sesuai dengan pendidikannya maka secara langsung akan menaikkan produktivitas dan pendapatan negara sehingga angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin akan turun pula. Maka dengan pernyataan tersebut dapat diasumsikan

bahwa Pendidikan memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin.

2.1.10 Hubungan Antara PDRB dengan Jumlah Penduduk Miskin

PDRB merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah.

Menurut BPS, kemiskinan dapat didefinisikan oleh dua cara yaitu ukuran pendapatan dan non pendapatan. Pada ukuran pendapatan, kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan atau pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum masyarakat yang mengacu pada rekomendasi Widyakarya Nasional dan Gizi tahun 1978 (Bappenas, 2009 :1).

Berdasarkan pada dari penelitian Hermanto S. dan Dwi Wahyuniarti. (2007), ketika perekonomian mengalami perkembangan di suatu wilayah maka terdapat lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan dan adanya distribusi pendapatan yang lebih baik dalam wilayah tersebut sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan daerah tersebut. Hasil dari penelitian tersebut dibenarkan oleh pernyataan Thamrin (2001) yang menyimpulkan bahwa semakin besar PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.

Dengan naiknya pendapatan suatu masyarakat maka dapat diasumsikan bahwa angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada suatu daerah akan mengalami penurunan. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PDRB memiliki hubungan negative terhadap jumlah penduduk miskin

2.1.11 Hubungan Antara Kesehatan dengan Jumlah Penduduk Miskin

Akses sumber air minum layak merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menyediakan pelayanan yang dapat menunjang derajat kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan pada pernyataan Juanita (2002), Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi oleh karena itu negara perlu memperhatikan kualitas dan kesehatan SDM. Hal ini dibenarkan oleh Lincoln (1999), dimana ia menjelaskan bahwa perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin dengan adanya peningkatan daya kerja, mengurangi hari tidak kerja dan menaikkan output energi. Oleh karena itu intervensi dalam perbaikan kesehatan masyarakat oleh pemerintah menjadi alat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.

Lalu menurut dari hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Oni Triono (2018 : 93-106) dapat disimpulkan bahwa akses air bersih memiliki

pengaruh pada produktivitas masyarakat di Surabaya. Ketika masyarakat memiliki akses yang buruk terhadap air bersih dapat menyebabkan penyakit terutama diare, dimana hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya waktu kerja sehingga terjadinya penurunan produktivitas yang berujung pada turunnya pendapatan suatu daerah tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Dengan pernyataan diatas maka dapat diasumsikan bahwa kesehatan yang ber indicator akses sumber air minum layak memiliki hubungan negative dengan jumlah penduduk miskin, yang berarti ketika kesehatan meningkat maka jumlah penduduk miskin akan menurun begitu juga sebaliknya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Secara ringkas dalam Tabel 2.1 disajikan ringkasan penelitian – penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Alat dan Hasil
1	Ravi Dwi W (2010) : Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008	Penelitian memakai metode OLS dan hasil Pendidikan dan Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penelitian	Alat dan Hasil
2	Ari Widiastuti (2010) : Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004 – 2008	Penelitian menggunakan metode OLS dengan hasil Pertumbuhan ekonomi dan Pendidikan berpengaruh negative dan signifikan. Sedangkan jumlah penduduk dan desentralisasi fiscal berpengaruh positif dan signifikan.
3	Nita Anggraini : Hubungan Kausalitas dari Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah	Penelitian menggunakan analisis jalur dan hasilnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi berhubungan dengan kemiskinan bersifat negatif dan signifikan. Diantara variable tersebut tingkat pendidikan memiliki pengaruh lebih dominan pada jumlah penduduk miskin

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penelitian	Alat dan Hasil
4	Muhammad Oni Triono : Akses Air Bersih Pada Masyarakat Kota Surabaya Serta Dampak Buruknya Akses Air Bersih Terhadap Produktivitas Masyarakat Kota Surabaya	Penelitian memakai analisis Two Way Anova dan hasilnya Terdapat perbedaan yang signifikan onset diare dengan sumber air bersih untuk mandi / mencuci dan kelompok masyarakat berdasarkan pendapatan.
5	Syamsul Amar, Alpon Satrianto dan Ariusni : Pengaruh Kondisi Kesehatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat	Penelitian memakai metode regresi panel dan hasilnya Angka harapan hidup dan gizi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sedangkan variabel morbiditas memiliki pengaruh negative signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penelitian	Alat dan Hasil
6	Janwar Hardi Halim (2014) : Analisis Produktivitas Sektoral Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah	Penelitian memakai metode panel data dan hasilnya variabel pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor industri, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada $\alpha = 10$ persen.
7	Eko Haryadi (2015) : Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah	Penelitian memakai metode asumsi klasik dan hasilnya Pendapatan Per Kapita memiliki pengaruh negative terhadap Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Penelitian	Alat dan Hasil
8	Prima Sukmaraga (2011) : Analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah	Penelitian memakai metode OLS, dan hasilnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
9	Angkepranitia Dhyan Nareswari (2014) : Proyeksi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2006-2017)	Penelitian memakai model Least Square Dummy Variabel dan hasilnya variabel pendapatan, kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. pengaruh yang mendominasi pada perubahan tingkat kemiskinan adalah pendapatan dan kesehatan. Untuk hasil proyeksi, target penurunan kemiskinan tahun 2013 tercapai sesuai target.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

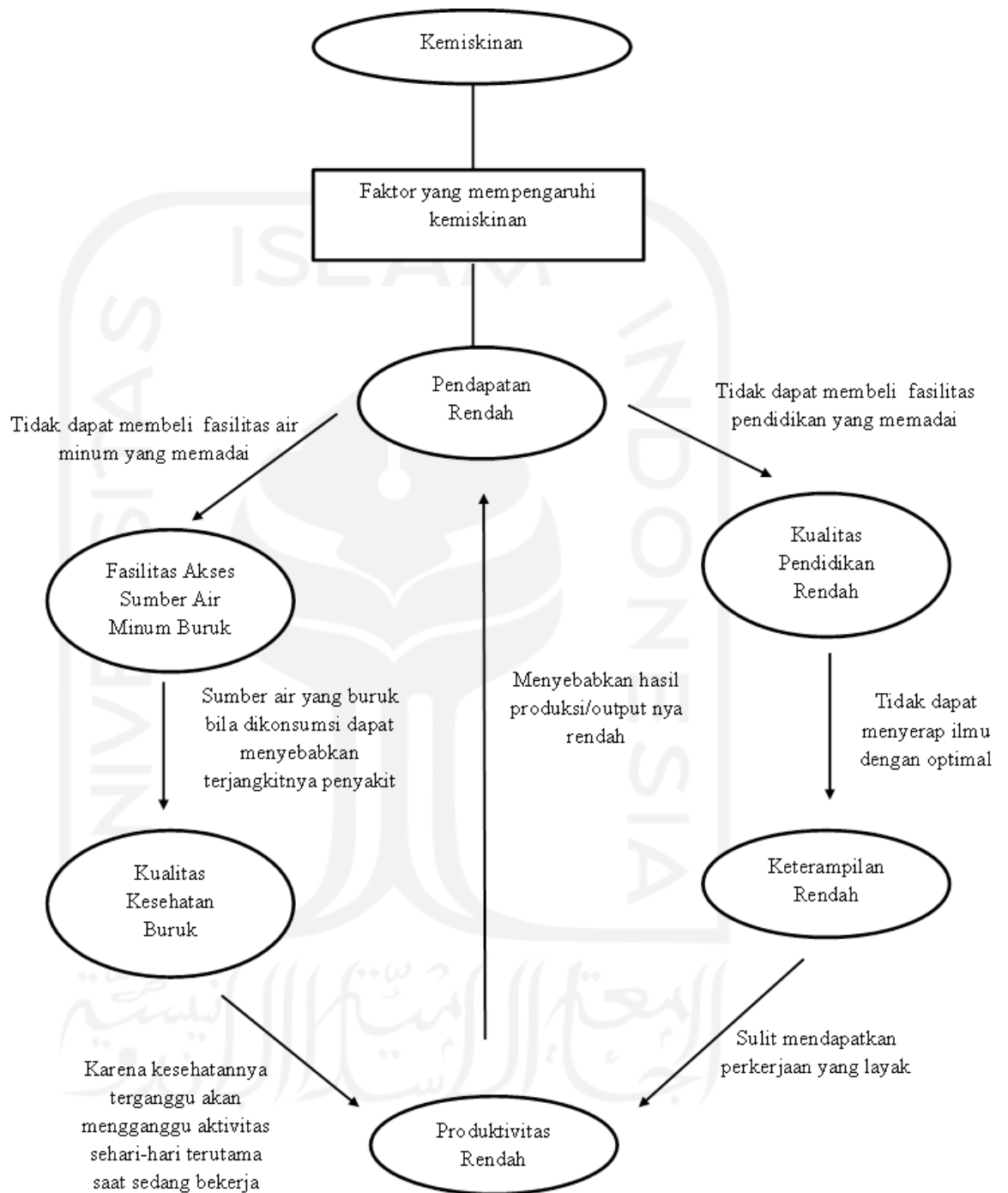
No	Penelitian	Alat dan Hasil
10	Achmad kurniawan Pamungkas (2018) : Analisis Determinan Keparahan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2011-2015	Penelitian memakai metode panel data dan hasilnya adalah secara simultan variable pengangguran, pendidikan, ketimpangan pendapatan/indeks gini, dan PDRB berpengaruh terhadap keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, lalu pada uji t, hanya variable pendidikan yang berpengaruh negative signifikan terhadap keparahan kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah memiliki hubungan terhadap tiga variable yaitu pendapatan, Pendidikan, dan sanitasi air. Pada pendapatan penulis menggunakan PDRB perkapita sebagai indicator. Pada Pendidikan penulis menggunakan Angka Melek Huruf sebagai indicator untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat dalam memperoleh kerja yang lebih baik. Lalu penulis juga memasukkan variable Akses Sumber Air Minum Layak untuk menggambarkan bahwa keberadaan air bersih yang layak

pakai dapat mempengaruhi Kesehatan masyarakat yang kemudian akan berakibat pada produktivitas masyarakat.

Variabel PDRB, Pendidikan, dan Akses Sumber Air Minum Layak merupakan variable independent dengan jumlah penduduk miskin sebagai variable dependen, yang kemudian variable-variabel tersebut akan di regresi untuk diharapkan dapat menghasilkan tingkat signifikannya dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin guna untuk menggambarkan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Jawa Tengah dapat merumuskan suatu kebijakan atau solusi yang relevan dalam upaya menurunkan kemiskinan. Secara skema, kerangka pemikiran penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari pemikiran Suryabrata (2000), hipotesis adalah kesimpulan yang diambil dari teori ilmiah (Penelitian Kuantitatif) dan bersifat sementara untuk sebagai hasil observasi dalam menghasilkan teori baru (Penelitian Kualitatif). Pada penelitian ini hipotesis yang telah disusun terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Diduga PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin
- 2) Diduga Pendidikan memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin
- 3) Diduga Akses Sumber Air Minum Layak memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu pengumpulan informasi atau data dari pihak lain (pihak ketiga). Sumber data yang diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah. Adapun data yang digunakan merupakan data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2007-2013 dan antar ruang (*cross section*) sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah sehingga jumlah observasi (N) yang dihasilkan adalah 245.

Penelitian ini menggunakan data panel (*pooling data*) atau data longituginal. Data panel (*cross sectional time series*) adalah sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu. *Cross section* untuk melihat perbedaan antar kabupaten/kota, dan *time series* untuk merefleksikan perubahan pada kurun waktu lima tahun selama periode tahun 2007-2013.

Berdasarkan dari pemikiran Gujarati (2003), keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menggunakan data panel adalah :

1. Data panel dapat memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas karena penggunaan data panel itu meliputi penggunaan data *cross section* dalam rentang waktu tertentu.

2. Data panel dapat memberikan informasi yang lebih baik, tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien karena adanya pengkombinasian data tersebut.
3. Dengan menggunakan data panel maka peneliti dapat mampu menurunkan bias yang dihasilkan ketika peneliti meregresikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Pada penggunaan dalam data panel, variabel yang hilang akan tetap menggambarkan perubahan lainnya yang diakibatkan oleh penggunaan data time series. Selain itu, penggunaan data yang tidak lengkap tidak akan mengurangi ketajaman estimasi. Dengan model data panel juga dapat mengeluarkan variabel yang sulit diobservasi, yang disebut sebagai individual effect, dimana effect tersebut dikategorikan menjadi dua macam yang bernama fixed effect dan random effect. Ketika sumber data berasal dari sample maka dugaan pada model panel yang digunakan adalah random effect, sedangkan ketika sumber data berasal dari data aggregate maka kecenderungan penggunaan model panel adalah fixed effect. Sedangkan pada Hausman Test, kita dapat memutuskan penggunaan model panel yang tepat antara random effect atau fixed effect.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui studi pusraka, yaitu Teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan

lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen. Jumlah penduduk miskin (P) sebagai variabel dependen, lalu variabel PDRB Perkapita (Y), Pendidikan (E), Kesehatan dan dummy (D) wilayah yang mewakili 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel independen.

3.3.2 Definisi Operasional

Berdasarkan Sugiyono (2014), definisi operasional merupakan penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga variabel-variabel yang digunakan dapat diukur agar para peneliti dapat melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama maupun dapat mengembangkan cara pengukuran konstruk yang baik. Definisi operasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Miskin (P) adalah jumlah total penduduk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (Dalam satuan ribuan jiwa). Data diambil dari BPS.

2. PDRB Per kapita (Y) adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah masing-masing di Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (Dalam satuan Juta Rupiah). Data diambil dari BPS.
3. Pendidikan (E) diwakili oleh Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (dalam bentuk persen). Data diambil dari BPS.
4. Kesehatan (H) diwakili Akses Sumber Air Minum Layak, yaitu air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2013 (dalam satuan persen). Data diambil dari BPS.

3.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisis data panel (*pooling data*) yang diolah memakai program Eviews 7. Analisis data panel merupakan

gabungan/kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Dalam model cross section dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ; i = 1, 2, \dots, N \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana :

Y : variable dependen

X : variable independent

N : banyaknya data cross section

Dan persamaan model dengan time series yaitu dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana T adalah banyaknya data time series.

Karena data panel menggunakan gabungan data dari time series dan cross section, maka model persamaannya dapat ditulis menjadi :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} ; i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T \dots\dots\dots (3.3)$$

dimana :

Y = variabel dependen

X = variabel independen

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Berdasarkan Hsiao (2003) dan Baltagi (2005), keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a) Data panel dapat menunjukkan keberadaan heterogenitas pada setiap individu di dalam estimasi yang telah dihasilkan.
- b) Data panel dapat mengurangi kolinearitas antar variabel, menjadikan data lebih informatif, lebih bervariasi, meningkatkan derajat kebebasan (degree of freedom), dan lebih efisien.
- c) Penelitian dengan menggunakan data panel dapat menentukan perubahan dinamis yang lebih unggul dibandingkan dengan penelitian berulang dari cross section.
- d) Dalam penggunaannya, data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek dengan lebih baik yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data times series atau cross section.
- e) Dengan menggunakan data panel, maka peneliti dimudahkan untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, seperti fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- f) Pada penggunaan data panel, peneliti juga dapat mengurangi bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Pada analisis model data panel memiliki dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (fixed effect) dan pendekatan efek acak (random effect) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan efek tetap (Fixed effect)

Berdasarkan pemikiran dari Gujarati (2012), model fixed effect merupakan model data panel dengan intercept yang berbeda-beda bagi setiap subjek (cross section), akan tetapi slope yang dimiliki pada setiap subjek tidak berubah seiring dengan waktu. Model fixed effect ini mengasumsikan bahwa intercept yang dimiliki itu berbeda pada setiap subjek sedangkan slope yang dimiliki tetap sama antar subjek. Bentuk persamaan model efek tetap sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_i + x_{it}^j \beta_j + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.4)$$

dimana:

Y_{it} = Variabel terikat di waktu t pada unit cross section i

α_i = Intercept yang berubah-ubah antar cross section unit

x_{it}^j = Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i

β_j = Parameter untuk variabel ke j

ε_{it} = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i

Pendekatan dari model yang memasukkan variabel dummy dikenal dengan nama model efek tetap (fixed effect) atau disebut juga dengan Covariance Model, dimana model efek tetap ini menambahkan sebanyak (N-1) variabel dummy (D_i) ke dalam model dan menghilangkan satu sisanya untuk menghindari kolinearitas sempurna antar variabel penjelas dan dalam pendekatan efek tetap akan terjadi degree of freedom. Dalam menggunakan variabel dummy ini harus didasarkan pada pertimbangan

statistik karena dengan melakukan penambahan variabel dummy ini akan dapat mengurangi banyaknya degree of freedom yang pada akhirnya akan mempengaruhi keefisienan dari parameter yang diestimasi.

2) Pendekatan efek acak (Random effect)

Berdasarkan pemikiran dari Kuncoro (2012), random effect disebabkan karena adanya variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual, dimana data residualnya diasumsikan memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Dan menurut dari Widarjono (2009), model ini digunakan untuk mengatasi kekurangan pada model fixed effect yang menggunakan data dummy. Pada penggunaan model ini, jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Bentuk model efek acak ini dijelaskan pada persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \alpha_i + x_{it}^j \beta_j + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it} \dots\dots\dots (3.6)$$

di mana :

$u_i - N(0, \delta_u^2)$ = komponen *cross section error*

$v_t - N(0, \delta_v^2)$ = komponen *time series error*

$w_i - N(0, \delta_w^2)$ = komponen *error kombinasi*

Asumsinya adalah error secara individu juga tidak saling berkorelasi begitu juga dengan error kombinasinya. Penggunaan model random

effect dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap sehingga berimplikasi bahwa parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien.

Dalam menetapkan keputusan dalam memilih penggunaan model efek tetap ataupun efek acak harus ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman. Pada spesifikasi hausman ini maka akan memberikan penilaian dengan menggunakan nilai Chi Square Statistics yang kemudian keputusan pemilihan model akan dapat ditentukan secara statistik.

3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Data Panel

Penelitian ini mengenai hubungan tingkat Pendidikan, PDRB, dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah, menggunakan data time series selama 7 tahun terakhir yang berupa data tahunan dari 2007-2013 dan cross section sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Alasan penulis menggunakan data time series dari tahun 2007 s.d 2013 adalah karena ketika penulis mencoba menggunakan data terbaru yaitu 2019 kebawah penulis selalu mendapatkan hasil regresi dimana variable paling penting yaitu PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja memberikan hasil yang tidak bagus, baik penghitungan tersebut berasal dari

PDRB Harga Konstan maupun Harga Berlaku yang telah penulis dapatkan di Badan Pusat Statistika. Ada beberapa penghitungan yang hanya menghasilkan salah satu dari mereka tidak signifikan dan ada yang menghasilkan keduanya tidak signifikan. Pada penghitungan pertama penulis menggunakan data BPS dari tahun 2015 s.d 2019 dengan variable PDRB Perkapita, Pendapatan Per Pekerja, Rata-rata Lama Sekolah dan Akses Sumber Air Minum Layak yang menghasilkan adanya perbedaan pada penetapan model dimana pada PDRB Perkapita mendapati model yang paling tepat adalah random effect dengan variable PDRB Perkapita dan Akses Sumber Air Minum Layak tidak signifikan sedangkan Pendapatan Per Pekerja mendapati fixed effect sebagai model yang paling tepat dengan Akses Sumber Air Minum Layak sebagai satu-satunya variable yang tidak signifikan,

Lalu untuk perhitungan kedua penulis mencoba untuk memanjangkan range tahun nya menjadi 10 tahun yaitu dari 2010 s.d 2019 dengan jenis variable yang masih sama dengan kombinasi dari data World Bank untuk melengkapi data Akses Sumber Air Minum Layak dari tahun 2010 s.d 2014. Dalam penghitungan tersebut penulis mendapatkan sedikit kemajuan dimana pada perhitungan yang menggunakan PDRB Perkapita dengan Pendapatan Per Pekerja, keduanya menghasilkan metode tepat yang sama yaitu fixed effect. Namun pada perhitungan PDRB Perkapita, semua variable tidak signifikan kecuali Akses Sumber Air Minum Layak sedangkan pada perhitungan

Pendapatan Per Pekerja, semua variable signifikan kecuali Akses Sumber Air Minum Layak.

Pada perhitungan ketiga penulis mencoba mengganti PDRBnya yang pertama dengan Harga Konstan menjadi Harga Berlaku dengan variable lain dan rentang waktu yang sama untuk melihat apakah terdapat perubahan hasil. Hasil yang didapat sangatlah berbeda dimana dengan PDRB Harga Konstan mendapati model fixed effect yang paling tepat sedangkan pada PDRB Harga Berlaku mendapati model random sebagai model yang paling tepat dan pada model ini variable yang signifikan hanya pada Rata-rata Lama Sekolah.

Lalu dalam perhitungan yang keempat, atas saran dari dosen penulis untuk mengunjungi data PDRB di World Bank dan penulis mendapati bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar dari jumlah PDRB di World Bank dengan BPS dimana penulis membandingkan PDRB tahun 2010 s.d 2013 karena World Bank hanya menyediakan PDRB terbaru sampai 2013 saja. Kemudian penulis mencoba melihat apakah variabel lain yang digunakan juga terdapat perbedaan, untuk jumlah penduduk miskin, angkatan kerja yang telah bekerja dan jumlah penduduk sama persis namun untuk rata-rata lama sekolah tidak tersedia di World Bank sehingga tidak dapat di bandingkan. Karena terdapat perbedaan tersebut penulis memutuskan untuk menghitung kembali menggunakan data dari yang disediakan oleh World Bank dari tahun 2007 s.d 2013 untuk seluruh variabel PDRB Harga Konstan baik dengan migas dan

non migas, akses sumber air minum layak dan untuk rata-rata lama sekolah diganti menjadi tingkat angka melek huruf. Hasil yang didapatkan untuk PDRB Migas dan PDRB Non Migas adalah keduanya sama-sama mendapati metode fixed effect sebagai metode yang paling tepat digunakan. Namun pada PDRB Migas, variabel PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja tidak signifikan sedangkan variabel yang lain signifikan. Lalu pada PDRB Non Migas semua variabelnya menunjukkan telah signifikan. Ketika penulis ingin mencoba untuk mencari data PDRB Non Migas di sumber lain untuk melengkapi dan memperbarui data, penulis tidak berhasil menemukannya. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan data PDRB Non Migas pada penelitian ini.

Kombinasi dari kedua data tersebut menghasilkan observasi sebanyak 175 dengan persamaan data panel sebagai berikut :

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 Y1_{it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 H_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.7)$$

$$P_i = \beta_0 + \beta_1 Y2_{it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 H_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.8)$$

Dimana :

P : jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y1 : PDRB Perkapita kabupaten/kota di Jawa Tengah

Y2 : Pendapatan Per Pekerja kabupaten/kota di Jawa Tengah

E : Tingkat Angka Melek 15 Tahun Keatas kabupaten/kota di Jawa Tengah

H : Akses Sumber Air Minum Layak di kabupaten/kota di Jawa Tengah

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi variabel bebas

μ_{it} : komponen error di unit cross section i

$i = 1, 2, 3, \dots, 35$ (data cross section kabupaten/kota di Jawa Tengah)

$t = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ (data time series tahun 2007-2013)

3.5 Uji Signifikansi

Uji signifikansi terdiri dari tiga macam yaitu :

1. Uji Goodness of Fit, berdasarkan Daniel (1989), uji ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui model distribusi peluang suatu populasi darimana sampel diambil sehingga dapat disimpulkan bahwa metode tersebut menguji hipotesis dimana populasi dari suatu sampel memiliki fungsi distribusi tertentu.
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F), uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel secara individu terhadap variabel terikat.

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pernyataan Gujarati (2003), Koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi

variabel dependen (*uji goodness of fit*). Pada koefisien determinasi ini memiliki nilai antara nol sampai dengan satu. Ketika nilai koefisien tersebut semakin besar maka variabel-variabel independen tersebut dinyatakan dapat lebih mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen, atau dengan kata lain koefisien determinasi mengukur variasi turunan Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Bila nilai koefisien determinasi yang diberi simbol R^2 mendekati angka 1, maka variabel independen makin mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh model tersebut dapat dibenarkan. Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

- 1) Koefisien determinasi digunakan sebagai alat ukur ketepatan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Apabila nilai R^2 semakin besar maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Sebaliknya, apabila semakin kecil nilai R^2 maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
- 2) Untuk mengukur proporsi atau presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y.

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara:

- 1) Menentukan hipotesis yang akan diuji (H_0 dan H_a).
- 2) Menentukan *level of significance* (α) tertentu.
- 3) Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} .
- 4) Menarik kesimpulan.

Apabila F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tidak bebas. Nilai F_{hitung} dicari dengan cara sebagai berikut:

$$F_{Hit} = \frac{R^2/(k-2)}{(1-R^2)(n-k)} \dots\dots\dots(3.9)$$

Dimana:

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah observasi

3.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Menurut Imam Ghozali (2005), uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independent

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Isi dari uji t dapat dijelaskan atau diuraikan dengan cara dibawah ini yaitu :

- 1) Bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5 persen, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Sehingga ketika uji t menerima hipotesis alternatif maka dapat disimpulkan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai t statistik dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t statistik hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dalam melakukan pengujian terhadap pengaruh variabel independen dengan dependen secara individu dapat menggunakan hipotesis sebagai berikut :

- $H_1 : \alpha_1 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variabel PDRB Per kapita secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.
- $H_2: \alpha_2 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variable pendidikan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.
- $H_3: \alpha_3 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif variable kesehatan secara individu terhadap variabel tingkat kemiskinan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Wilayah Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 15 Agustus 1950 (Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah), Provinsi Jawa Tengah ditetapkannya pembentukan sebesar 29 kabupaten dan 6 kota-kota madya. Kondisi geografis di Jawa Tengah memiliki hamparan tanah dengan kesuburan yang relative tinggi serta iklim yang tropis dengan curah hujan rata-rata sebesar 2.000 meter per tahun (Suhu = 21 - 32°C). Kemudian dari sisi demografisnya, Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 34.718.204 jiwa di tahun 2019 (Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik) dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kota Semarang (1.814.110 jiwa), Kabupaten Brebes (1.809.096 jiwa), Kabupaten Cilacap (1.727.098 jiwa). Menurut data dari Badan Pusat Statistika, kepadatan penduduk tertinggi di povinsi Jawa Tengah berada di Surakarta sebesar 11.293 per km² sedangkan daerah dengan kepadatan penduduk terendah berada di daerah Kabupaten Blora yang sebesar 479 per km². Laju pertumbuhan penduduk di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 0,77% per tahun, dengan presentase tertinggi berada di wilayah Kota Semarang yaitu sebesar 1,81% pertahun, sedangkan daerah yang memiliki

presentase laju pertumbuhan penduduk terendah berada di wilayah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Magelang dengan presentase sebesar 0,33% pertahun di semua wilayah tersebut. Provinsi Jawa Tengah memiliki penduduk yang didominasi oleh Suku Jawa dengan suku minoritas berupa Suku Tionghoa (Kota Semarang dan Kota Lasem), Arab-Indonesia, Komunitas Samin (Kabupaten Blora) dan Komunitas Sunda (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas). Secara umum pendidikan bahasa daerah yang diajarkan di Provinsi Jawa Tengah adalah Pendidikan Bahasa Jawa (Bahasa Jawa Baku dialek Surakarta-Yogyakarta) untuk seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan yang tertera SK Gubernur Nomor 895.5/01/2005.

4.1.1.2 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang baik karena angka pertumbuhan yang terus menerus mengalami kenaikan di setiap tahunnya dan selalu berada di atas angka pertumbuhan nasional, dimana berdasarkan PDRB lapangan usaha, Jawa Tengah memiliki tiga macam lapangan usaha yang mendominasi yang terdiri dari industry pengolahan, pertanian dan perdagangan, sedangkan berdasarkan dari sisi pengeluaran,

Jawa Tengah didukung oleh tiga komponen yaitu konsumsi rumah tangga, PMTB dan konsumsi pemerintah.

Pada tahun 2019, provinsi Jawa Tengah telah memperoleh capaian 4 indikator dari target 6 indikator makro, dimana pertumbuhan ekonomi telah tercapai sebesar 5.41 dengan target 5.4 sampai dengan 5.8, inflasi telah mencapai angka 2.81 dengan target 4 ± 1 , dan TPT telah mencapai angka 4.22 dengan target 4.33 sampai dengan 4.37. Walaupun berdasarkan angka kemiskinan, provinsi Jawa Tengah masih belum dapat mencapai indeks gini dan IPM yang diinginkan, provinsi ini menjadi provinsi terbaik dalam penurunan jumlah penduduk miskin dengan ketimpangan rendah.

Pada tahun 2019, Jawa Tengah menghasilkan Rp 112.7 di realisasi penerimaan pemerintahan pusat dan daerah, dimana angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2018. Secara rincian, pendapatan yang diterima pemerintahan pusat naik dari 80,1 trilliun di tahun 2018 menjadi 82,5 trilliun sehingga mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan tahun 2018, hal ini dikarenakan terdapat dorongan dari penambahan basis data pajak dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Lalu pada pendapatan daerah, Jawa Tengah mengalami peningkatan pendapatan APBD sebesar 5% dibandingkan dari tahun 2018 yang didorong oleh adanya kenaikan transfer sebesar 6% ke daerah yang mencapau 68% porsi dari pendapatan APBD.

4.1.2 Variabel Penelitian

4.1.2.1 Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut BPS merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pakaian, tempat tinggal, makanan pendidikan dan kesehatan yang dianggap sebagai kebutuhan dan memiliki standar tertentu dan diukur melalui sisi pengeluaran.

Kemiskinan sendiri merupakan suatu masalah yang sangat kompleks karena berkaitan dengan beragam macam seperti pendapatan yang rendah, kesehatan yang tidak sepenuhnya terjamin, Pendidikan yang rendah yang diakibatkan karena putus sekolah, serta lingkungan yang buruk. Karena hal tersebut, pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut dengan melakukan pembangunan secara terus menerus. Kemiskinan dalam penelitian ini dilihat dari jumlah penduduk miskin dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, dimana merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Berikut table Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2013 :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2007-2013

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Cilacap	363,6	343,9	318,8	297,2	282	260,9	255,7
Kab. Banyumas	333	340,7	319,8	314,2	328,5	303,9	296,8
Kab. Purbalingga	246,3	221,9	205	209	196	181,3	181,1
Kab. Banjarnegara	232,9	200,6	184	166,7	177,3	164	166,8
Kab. Kebumen	362,4	334,9	309,6	263,1	279,4	258,5	251,1
Kab. Purworejo	146	130	121,4	115,3	121,9	112,8	109
Kab. Wonosobo	241,4	207,5	194	174,8	183	169,3	170,1
Kab. Magelang	200,1	190,8	176,5	167,3	179,6	166,2	171
Kab. Boyolali	167	158,4	148,2	127,8	139,5	129,1	126,5
Kab. Klaten	249,1	243,1	220,2	197,4	203,1	187,9	179,5
Kab. Sukoharjo	113,8	99,1	94,4	90,2	92	85,1	84,1
Kab. Wonogiri	237,4	201,1	184,9	145,6	146,4	135,4	132,2
Kab. Karanganyar	138,9	125,9	118,8	113,8	124,5	115,2	114,4
Kab. Sragen	180,7	177,1	167,3	149,8	154,3	142,8	139
Kab. Grobogan	330,4	262	247,5	233,8	227,8	210,8	199

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Blora	176,8	155,1	146	135	134,9	124,8	123,8
Kab. Rembang	174,3	154,7	147,2	138,6	140,4	129,9	128
Kab. Pati	228,8	207,2	184,1	172,4	175,1	162	157,9
Kab. Kudus	82,4	97,8	84,9	70,2	73,6	68,1	70,1
Kab. Jepara	111,2	119,2	104,7	111,9	113,3	104,8	106,9
Kab. Demak	238,9	217,2	202,2	198,9	192,5	178,1	172,5
Kab. Semarang	110,1	102,5	96,7	97,9	96	88,8	83,2
Kab. Temanggung	115	114,7	105,8	95,4	94,9	87,8	91,1
Kab. Kendal	192,7	168,2	152,4	130,4	128,6	119	117,7
Kab. Batang	139,8	122	112,2	103,6	95,3	88,2	87,5
Kab. Pekalongan	170	164,3	151,6	136,6	125,9	116,5	116,5
Kab. Pemasang	307,1	325,2	303,7	251,9	261,2	241,7	246,8
Kab. Tegal	258,6	220,7	195,5	182,5	161,1	149	149,8
Kab. Brebes	492,2	459,3	432,4	398,8	394,4	364,9	367,9
Kota Magelang	13	14,9	13,7	12,4	13,1	12,1	11,8

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Surakarta	69,8	83,4	78	69,9	64,5	59,7	59,7
Kota Salatiga	15,6	14,9	14,1	14,2	13,3	12,3	11,5
Kota Semarang	77,6	89,6	73,1	79,7	88,5	81,9	86,7
Kota Pekalongan	17,9	28	23,3	26,4	28,3	26,8	24,1
Kota Tegal	22,2	26,8	23,4	25,7	25,9	24	21,6

Sumber : World Bank

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh wilayah di Jawa Tengah telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin selama 5 tahun dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di wilayah Kabupaten Brebes dengan nilai 367.900 ribu jiwa pada tahun 2013, Kabupaten Banyumas dengan nilai 296.800 ribu jiwa pada tahun 2013 dan Kabupaten Cilacap dengan nilai 255.700 ribu jiwa pada tahun 2013

4.1.2.2 Angka Melek Huruf

Pada penelitian ini variable yang digunakan sebagai indicator Pendidikan adalah Angka Melek Huruf diatas 15 tahun. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Sistem Pendidikan dasar yang efektif dan efisien dapat dilihat dari Angka

Melek Huruf, dimana semakin tinggi Angka Melek Huruf maka akan menunjukkan bahwa system pendidikan dasar atau program keaksaraan juga akan semakin efektif dan efisien sehingga memungkinkan untuk sebagian besar penduduk telah memperoleh kemampuan dalam menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari serta untuk kelanjutan pembelajarannya.

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Diatas Umur 15 Keatas Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2007-2013.

Angka Melek Huruf Diatas umur 15 keatas (%)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Cilacap	88,71	89,15	90	90,24	91,48	90,42	91,97
Kab. Banyumas	93,31	94,71	93,31	93,92	94,06	94,25	94,77
Kab. Purbalingga	89,17	91,06	92,07	93,48	92,63	92,86	93,78
Kab. Banjarnegara	87,29	88,18	86,82	87,43	88,24	87,64	91,18
Kab. Kebumen	89,48	90,23	90,28	90,74	91,53	88,9	91,04
Kab. Purworejo	88,03	89,2	91,65	91,51	91,74	92,79	93,53
Kab. Wonosobo	88,2	88,81	89,81	90,47	91,16	91,43	94,32
Kab. Magelang	86,86	89,9	89,38	90,23	93,29	92,48	92,58
Kab. Boyolali	85,96	85,03	84,47	85,82	88,59	87,49	88,12

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Diatas Umur 15 Keatas Provinsi Jawa

Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2007-2013 (lanjutan)

Angka Melek Huruf Diatas umur 15 keatas (%)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Klaten	89,28	89,07	89,39	89,89	87,68	87,23	89,35
Kab. Sukoharjo	89,75	90,74	90,19	90,69	89,56	88,78	91,36
Kab. Wonogiri	80,94	81,48	81,64	82,03	83,5	84,33	84,60
Kab. Karanganyar	84,15	85,07	85,24	86,91	89,37	88,95	90,31
Kab. Sragen	81,05	79,24	85,19	88,74	83,22	82,07	82,91
Kab. Grobogan	88,12	89,22	86,36	87,92	89,57	90,94	91,78
Kab. Blora	81,33	84,07	81,03	81,84	85,06	83,42	86,63
Kab. Rembang	88,18	89,38	90,66	91,17	91,36	90,87	92,07
Kab. Pati	85,83	85,63	84,22	84,78	87,59	87,38	89,56
Kab. Kudus	90,57	91,98	93,34	93,71	92,77	92,99	94,16
Kab. Jepara	92,62	92,92	91,36	90,94	92,46	93,29	94,26
Kab. Demak	90,82	90,71	90,29	91,36	92,52	92,32	93,09
Kab. Semarang	93,51	92,9	91,85	92,34	92,39	94,2	94,75
Kab. Temanggung	92,21	94,19	92,36	93,38	94,48	92,36	93,02
Kab. Kendal	88,93	88,82	88,67	89,15	89,31	89,77	90,84

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Diatas Umur 15 Keatas Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten Tahun 2007-2013 (lanjutan)

Angka Melek Huruf Diatas umur 15 keatas (%)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Batang	86,29	88,53	87,34	88,09	90,36	89,93	92,31
Kab. Pekalongan	86,62	89,94	92,03	92,05	90,08	91,98	93,42
Kab. Pemalang	87,34	86,58	90,19	90,76	88,56	89,12	89,39
Kab. Tegal	88,46	89,09	86,51	87,59	89,47	90,64	91,66
Kab. Brebes	84,85	84,31	85,79	86,14	84,72	86,69	87,68
Kota Magelang	97,17	96,91	96,68	96,8	96,96	97,52	98,11
Kota Surakarta	95,27	96,66	95,63	95,96	95,98	96,35	97,92
Kota Salatiga	96,49	95,96	95,44	96	95,03	95,46	96,13
Kota Semarang	95,94	95,55	96,27	96,33	96	96,97	97,72
Kota Pekalongan	95,04	94,95	95,27	95,68	95,93	94,92	97,87
Kota Tegal	94,71	94,8	93,51	93,66	92,11	94,91	94,10

Sumber : Diolah dari Data World Bank

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf terbesar pada tahun 2013 berada di wilayah Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan, yang masing-masing nilainya sebesar 98.11%, 97.91% dan 97.86%.

Dari tahun 2012 sampai 2013 semua wilayah Jawa Tengah telah mengalami kenaikan kecuali pada wilayah Kota Tegal yang mengalami penurunan sebesar 0.81%.

4.1.2.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian dengan mengetahui rata-rata pendapatan yang diterima pada seluruh masyarakat dalam kurun waktu satu tahun dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. PDRB perkapita ini didapatkan dari hasil perolehan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Berikut table PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2013 :

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2013.

PDRB Perkapita Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Cilacap	6,86	7,19	7,55	7,92	14,92	15,28	15,55
Kab. Banyumas	2,65	2,77	2,91	2,99	3,13	3,28	3,47
Kab. Purbalingga	2,61	2,73	2,87	2,98	3,11	3,27	3,42
Kab. Banjarnegara	2,89	3,01	3,15	3,32	3,45	3,61	3,77

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

PDRB Perkapita Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Kebumen	2,13	2,24	2,31	2,54	2,63	2,77	2,87
Kab. Purworejo	3,60	3,79	3,96	4,34	4,53	4,74	4,95
Kab. Wonosobo	2,23	2,30	2,38	2,50	2,59	2,71	2,83
Kab. Magelang	3,09	3,21	3,34	3,48	3,59	3,76	3,93
Kab. Boyolali	4,02	4,16	4,34	4,57	4,76	5,00	5,23
Kab. Klaten	3,89	4,03	4,19	4,29	4,34	4,56	4,80
Kab. Sukoharjo	5,28	5,49	5,71	6,04	6,24	6,50	6,76
Kab. Wonogiri	2,71	2,82	2,95	3,31	3,36	3,54	3,68
Kab. Karanganyar	5,78	6,03	6,31	6,70	6,98	7,32	7,63
Kab. Sragen	3,01	3,17	3,35	3,58	3,78	4,02	4,26
Kab. Grobogan	2,11	2,21	2,30	2,49	2,55	2,69	2,80
Kab. Blora	2,18	2,29	2,40	2,55	2,68	2,80	2,93
Kab. Rembang	3,49	3,64	3,78	3,86	3,99	4,14	4,31
Kab. Pati	3,40	3,55	3,71	3,85	4,02	4,23	4,44
Kab. Kudus	14,51	14,86	15,23	16,27	16,69	17,18	17,76

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

PDRB Perkapita Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Jepara	3,47	3,57	3,69	3,89	4,03	4,19	4,37
Kab. Demak	2,61	2,70	2,78	2,86	2,95	3,05	3,16
Kab. Semarang	5,41	5,57	5,75	5,97	6,20	6,48	6,75
Kab. Temanggung	3,06	3,14	3,23	3,40	3,51	3,65	3,80
Kab. Kendal	4,93	5,07	5,27	5,99	6,28	6,57	6,85
Kab. Batang	3,08	3,18	3,28	3,34	3,48	3,61	3,76
Kab. Pekalongan	3,36	3,49	3,61	3,85	3,99	4,17	4,37
Kab. Pemasang	2,20	2,29	2,37	2,74	2,85	2,99	3,14
Kab. Tegal	2,21	2,32	2,44	2,60	2,71	2,84	2,99
Kab. Brebes	2,69	2,79	2,91	3,18	3,31	3,46	3,62
Kota Magelang	7,16	7,38	7,62	9,38	9,83	10,43	11,00
Kota Surakarta	8,32	8,70	9,12	10,22	10,76	11,36	11,98
Kota Salatiga	4,54	4,66	4,77	5,36	5,54	5,79	6,05
Kota Semarang	12,19	12,68	13,16	13,73	14,31	14,97	15,63
Kota Pekalongan	6,66	6,86	7,14	7,42	7,72	8,07	8,46

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

PDRB Perkapita Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kota Tegal	4,63	4,85	5,08	5,35	5,55	5,80	6,06

Sumber : Diolah dari Data World Bank

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang memiliki PDRB Perkapita Tertinggi di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai 2013, dimana Pendapatan yang paling besar berada di Kota Kudus dengan angka sebesar 17.75 Juta Rupiah pada tahun 2013, dan Kota Cilacap berada di peringkat kedua dengan angka sebesar 15.55 Juta Rupiah di tahun 2013 dan yang terakhir adalah Kabupaten Semarang dengan nilai sebesar 15.62 Juta Rupiah di tahun 2013. Sedangkan daerah yang memiliki PDRB Perkapita terkecil di tahun 2013 berada di daerah Kabupaten Grobogan dengan PDRB Perkapita sebesar 2.80 Juta Rupiah, Kabupaten Wonosobo dengan PDRB Perkapita sebesar 2.83 Juta Rupiah, dan Kabupaten Kebumen dengan PDRB Perkapita sebesar 2.87 Juta Rupiah.

4.1.2.4 Pendapatan Per Pekerja

Pendapatan per pekerja adalah hasil dari data PDRB yang dibagi dengan Angkatan kerja yang sedang bekerja untuk dibandingkan dengan PDRB

perkapita dan mengetahui factor mana yang lebih signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Penulis memilih variable Angkatan kerja yang sedang bekerja sebagai pembanding adalah karena secara logika tidak semua penduduk telah bekerja dan menghasilkan barang atau jasa sedangkan PDRB menurut BPS merupakan hasil dari seluruh penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai factor unit produksi di dalam suatu wilayah di negara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 4.4 Pendapatan Per Pekerja Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2013

Pendapatan Per Pekerja Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Cilacap	15,53	17,50	17,84	18,89	30,97	34,83	34,49
Kab. Banyumas	5,96	6,34	6,47	6,34	6,48	7,14	7,70
Kab. Purbalingga	5,47	5,92	5,95	6,03	6,53	6,18	6,73
Kab. Banjarnegara	5,57	6,02	6,39	6,38	7,06	6,42	7,25
Kab. Kebumen	4,40	5,03	5,08	5,48	5,49	5,24	5,70
Kab. Purworejo	7,00	8,04	8,42	8,85	9,17	9,51	9,73
Kab. Wonosobo	4,35	4,76	4,76	4,95	5,34	5,18	5,94
Kab. Magelang	5,63	6,35	6,56	6,54	7,27	7,04	7,93

Tabel 4.4 Pendapatan Per Pekerja Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

Pendapatan Per Pekerja Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Boyolali	7,06	7,72	8,00	8,38	9,67	9,30	5,44
Kab. Klaten	7,52	8,04	8,24	8,83	8,74	8,53	8,20
Kab. Sukoharjo	10,15	11,03	11,49	12,43	12,65	13,24	8,84
Kab. Wonogiri	4,93	5,27	5,27	6,20	6,48	6,41	34,88
Kab. Karanganyar	10,71	11,52	12,38	12,76	14,10	14,24	9,01
Kab. Sragen	5,46	6,07	6,20	6,62	7,54	7,39	6,81
Kab. Grobogan	3,84	4,45	4,30	4,73	5,19	5,04	12,44
Kab. Blora	3,85	4,43	4,40	4,79	5,27	5,25	6,88
Kab. Rembang	6,77	7,45	7,23	7,50	7,95	7,71	13,59
Kab. Pati	6,52	7,28	7,38	7,87	8,01	8,90	7,64
Kab. Kudus	27,21	28,14	29,85	32,08	34,39	32,26	9,17
Kab. Jepara	6,92	7,81	7,66	7,96	8,54	8,31	7,01
Kab. Demak	5,05	5,57	5,86	6,13	6,24	6,51	7,15
Kab. Semarang	10,34	10,72	11,26	11,06	12,60	11,72	7,54
Kab. Temanggung	5,41	6,04	6,20	6,08	6,99	6,49	22,14

Tabel 4.4 Pendapatan Per Pekerja Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2007-2013 (lanjutan)

Pendapatan Per Pekerja Excluding Oil and Gas (Juta Rupiah)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Kendal	8,74	10,00	10,41	12,06	12,80	12,90	13,59
Kab. Batang	6,00	6,61	6,97	6,69	7,15	7,13	7,64
Kab. Pekalongan	6,82	7,54	7,51	8,04	8,59	8,57	9,17
Kab. Pemalang	5,01	5,75	5,80	6,71	6,12	6,43	7,01
Kab. Tegal	4,67	5,40	5,86	6,19	5,81	6,57	7,15
Kab. Brebes	5,83	6,58	6,90	6,78	7,01	8,12	7,54
Kota Magelang	16,99	18,22	18,62	20,64	19,85	21,27	22,14
Kota Surakarta	16,51	18,12	19,52	21,63	21,70	22,00	22,80
Kota Salatiga	10,32	10,77	11,05	12,45	11,46	11,66	12,21
Kota Semarang	27,36	29,08	28,68	29,48	29,49	30,43	32,01
Kota Pekalongan	14,49	14,77	14,84	15,46	16,78	16,97	18,20
Kota Tegal	10,32	11,09	11,94	11,91	11,64	13,48	12,62

Sumber : Diolah dari Data World Bank

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang memiliki Pendapatan Per Pekerja

Tertinggi di Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2013, dimana Pendapatan yang paling besar berada di Kota Kudus dengan naik sebesar 34.8 Juta Rupiah di Tahun 2013, dan Kota Cilacap berada di peringkat kedua dengan nilai 34.4 Juta Rupiah di tahun 2013 dan yang terakhir adalah Kabupaten Semarang dengan nilai sebesar 32,01 Juta Rupiah di tahun 2013. Dari tahun 2012 sampai 2013 semua wilayah mengalami kenaikan kecuali wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang dan Kota Tegal.

4.1.2.5 Akses Sumber Air Minum Layak

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau air yang berasal dari mata air serta sumur yang terlindung, air dari sumur bor atau sumur pompa, yang sarana tersebut memiliki jarak minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Hal tersebut tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air dari sumur dan mata air tidak terlindung. Dengan semakin besarnya akses-akses sumber air minum layak yang dapat digunakan oleh rumah tangga maka akan menunjukkan semakin baiknya kondisi kesehatan yang dimiliki penghuni pada rumah tangga di suatu daerah tersebut. Berikut ini adalah rincian mengenai Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2007-2013.

Tabel 4.5 Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2007-2013

Akses Sumber Air Layak (%)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Cilacap	47,54	37,54	52,65	57,97	63,84	66,31	67,83
Kab. Banyumas	42,70	43,55	54,27	60,71	58,32	59,03	62,48
Kab. Purbalingga	50,57	48,71	54,16	61,68	59,28	65,82	57,84
Kab. Banjarnegara	48,90	41,46	42,38	47,06	64,85	72,61	65,79
Kab. Kebumen	41,92	42,33	46,92	55,93	53,28	48,13	51,99
Kab. Purworejo	55,44	59,50	62,52	62,73	66,84	67,00	64,21
Kab. Wonosobo	73,77	70,83	72,87	69,55	80,46	74,29	83,54
Kab. Magelang	55,07	55,35	56,26	59,04	62,33	64,87	63,25
Kab. Boyolali	58,18	48,11	63,85	58,46	63,80	60,69	64,68
Kab. Klaten	58,55	54,20	59,88	59,13	61,94	64,62	65,53
Kab. Sukoharjo	63,71	55,44	70,82	67,36	69,66	72,52	73,22
Kab. Wonogiri	55,84	53,75	54,21	60,61	56,21	56,89	58,51
Kab. Karanganyar	69,68	81,02	72,00	78,53	75,52	73,11	70,80
Kab. Sragen	72,76	72,66	73,30	79,57	80,22	75,34	74,68

Tabel 4.5 Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2007-2013 (lanjutan)

Akses Sumber Air Layak (%)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Grobogan	59,82	51,29	47,92	49,34	51,77	61,36	66,00
Kab. Blora	58,17	69,14	79,21	67,59	78,61	75,95	77,82
Kab. Rembang	61,37	57,75	52,71	61,28	60,44	59,68	66,84
Kab. Pati	65,39	73,71	66,68	71,71	73,79	76,64	76,23
Kab. Kudus	56,02	67,68	67,01	73,13	73,30	84,40	71,59
Kab. Jepara	58,74	61,74	53,55	62,20	65,83	65,37	72,02
Kab. Demak	68,89	60,20	72,48	65,05	77,02	65,72	71,10
Kab. Semarang	61,76	71,02	73,83	75,92	78,17	83,55	78,80
Kab. Temanggung	46,10	62,18	73,08	57,25	65,91	68,63	69,89
Kab. Kendal	67,63	74,09	80,92	78,92	75,99	74,69	76,73
Kab. Batang	50,18	45,34	61,57	55,48	57,52	51,70	61,53
Kab. Pekalongan	42,68	42,67	57,03	48,32	51,77	54,43	57,09
Kab. Pemasang	44,56	45,99	45,41	52,79	44,55	41,95	40,43
Kab. Tegal	43,86	49,80	51,09	56,39	58,76	58,16	55,19

Tabel 4.5 Akses Sumber Air Minum Layak di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2013 (lanjutan)

Akses Sumber Air Layak (%)							
Wliayah Kabupaten/Kota	Tahun						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Brebes	42,44	52,39	56,03	57,51	59,22	54,31	54,80
Kota Magelang	87,17	82,15	86,18	90,34	91,70	94,70	91,52
Kota Surakarta	77,81	76,86	81,10	78,10	82,36	80,90	82,69
Kota Salatiga	72,34	85,86	81,89	88,51	87,69	90,47	86,86
Kota Semarang	78,97	84,69	81,04	89,54	88,86	89,81	93,10
Kota Pekalongan	65,68	60,18	56,86	70,46	65,63	68,78	73,46
Kota Tegal	96,38	93,73	91,61	92,96	97,44	96,51	95,19

Sumber : World Bank

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas terdapat naik-turunnya tingkat akses di seluruh wilayah di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai 2013, dimana banyaknya penurunan secara terus menerus dalam akses sumber air minum layak di Jawa Tengah di tahun 2010 sampai 2013 berada pada Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Karanganyar pada wilayah Demak dan Semarang. Dari tahun 2010 sampai 2013, Kabupaten Pemalang dan Karanganyar, masing-masing mengalami penurunan sebesar 12.37% dan 7.7%. Sedangkan tingkat akses

sumber air minum layak di tahun 2013 berada pada wilayah Kota Tegal, Kota Semarang dan Kota Magelang.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Regresi Data Yang Menggunakan PDRB Perkapita

4.2.1.1 Hasil Regresi Model Common, Fixed dan Random Effect

Tabel 4.7 Hasil Regresi Common Effect (PDRB Perkapita)

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/06/21 Time: 21:19
 Sample: 2007 2013
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	876080.9	108806.7	8.051720	0.0000
PDRB_Perkapita	-1708.085	1561.713	-1.093725	0.2752
Angka_Melek_Huruf	-5141.537	1270.872	-4.045676	0.0001
Akses_Sumber_Air_Layak	-3736.226	375.8133	-9.941707	0.0000
R-squared	0.478599	Mean dependent var		157080.0
Adjusted R-squared	0.472108	S.D. dependent var		92571.78
S.E. of regression	67259.09	Akaike info criterion		25.08668
Sum squared resid	1.09E+12	Schwarz criterion		25.14385
Log likelihood	-3069.119	Hannan-Quinn criter.		25.10970
F-statistic	73.73873	Durbin-Watson stat		0.169600
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4.8 Hasil Regresi Fixed Effect (PDRB Perkapita)

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/21 Time: 21:20

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	677546.6	81440.24	8.319556	0.0000
PDRB_Perkapita	-6419.803	1651.583	-3.887061	0.0001
Angka_Melek_Huruf	-4737.128	957.2072	-4.948906	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-901.2228	257.0365	-3.506205	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.964822	Mean dependent var	157080.0
Adjusted R-squared	0.958535	S.D. dependent var	92571.78
S.E. of regression	18850.46	Akaike info criterion	22.66813
Sum squared resid	7.36E+10	Schwarz criterion	23.21118
Log likelihood	-2738.845	Hannan-Quinn criter.	22.88681
F-statistic	153.4437	Durbin-Watson stat	0.860160
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 4.9 Hasil Regresi Random Effect (PDRB Perkapita)

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/06/21 Time: 21:21

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	688515.2	79446.15	8.666439	0.0000
PDRB_Perkapita	-5994.514	1529.931	-3.918159	0.0001
Angka_Melek_Huruf	-4756.309	924.3756	-5.145429	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-1075.043	248.8057	-4.320812	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			65857.45	0.9243
Idiosyncratic random			18850.46	0.0757
Weighted Statistics				
R-squared	0.375639	Mean dependent var	16895.15	
Adjusted R-squared	0.367866	S.D. dependent var	24082.57	
S.E. of regression	19147.28	Sum squared resid	8.84E+10	
F-statistic	48.33147	Durbin-Watson stat	0.750249	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.360514	Mean dependent var	157080.0	
Sum squared resid	1.34E+12	Durbin-Watson stat	0.049575	

4.2.1.2 Pemilihan Model Yang Tepat

4.2.1.2.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih antara model common effect dengan model fixed effect.

H_0 = Tidak ada perbedaan dalam intercept (Model common effect)

H_a = Terdapat perbedaan dalam intercept (Model fixed effect)

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (p-value) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai $\text{Prob.} < \alpha$ (0.10) maka menolak H_0 , artinya model fixed effect yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai $\text{Prob.} > \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H_0 , artinya model common effect yang tepat.

Tabel 4.10 Uji Chow (PDRB Perkapita)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_PDRB_LOG
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	84.151194	(34,207)	0.0000
Cross-section Chi-square	660.546508	34	0.0000

Didapatkan nilai probabilitas cross section f sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect.

4.2.1.2.2 Uji Langrange Multiplier

Tabel 4.11 Uji Langrange Multiplier (PDRB Perkapita)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	550.3447 (0.0000)	2.493872 (0.1143)	552.8386 (0.0000)
Honda	23.45943 (0.0000)	-1.579200 (0.9429)	15.47166 (0.0000)
King-Wu	23.45943 (0.0000)	-1.579200 (0.9429)	7.629847 (0.0000)
Standardized Honda	24.85422 (0.0000)	-1.415116 (0.9215)	12.45951 (0.0000)
Standardized King-Wu	24.85422 (0.0000)	-1.415116 (0.9215)	4.981495 (0.0000)
Gourieroux, et al.*	--	--	550.3447 (0.0000)

Didapatkan hasil cross section breusch pagan sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak Ho. Kesimpulannya adalah model yang tepat untuk digunakan adalah random effect.

4.2.1.2.3 Uji Haustman

Berdasarkan hasil dari uji chow bahwa model yang tepat merupakan model fixed effect, maka langkah selanjutnya yaitu memilih antara model random effect dengan model fixed effect menggunakan uji hausman.

H₀ = Model random effect

H_a = Model fixed effect

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (p-value) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai Prob. < α (0.10) maka menolak H₀, artinya model fixed effect yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai Prob. > α (0.10) maka gagal menolak H₀, artinya model random effect yang tepat.

Tabel 4.12 Uji Haustman (PDRB Perkapita)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM_PDRB_NONLOG
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.649552	3	0.0138

Didapatkan hasil cross section random sebesar 0.0138, nilai tersebut lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H₀. Kesimpulannya adalah model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect.

4.2.1.3 Uji Statistika dengan Model Fixed Effect

$$Pit = \beta_0 + \beta_1 Y1_{it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 H_{it} + \mu_{it}$$

4.2.1.4 Hasil Regresi Fixed Effect

Berdasarkan dari pengujian uji chow, uji langrange multiplier dan uji haustman, model regresi yang paling tepat untuk digunakan adalah menggunakan regresi fixed effect.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	677546.6	81440.24	8.319556	0.0000
PDRB_Perkapita	-6419.803	1651.583	-3.887061	0.0001
Angka_Melek_Huruf	-4737.128	957.2072	-4.948906	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-901.2228	257.0365	-3.506205	0.0006
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.964822	Mean dependent var	157080.0	
Adjusted R-squared	0.958535	S.D. dependent var	92571.78	
S.E. of regression	18850.46	Akaike info criterion	22.66813	
Sum squared resid	7.36E+10	Schwarz criterion	23.21118	
Log likelihood	-2738.845	Hannan-Quinn criter.	22.88681	
F-statistic	153.4437	Durbin-Watson stat	0.860160	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Regresi

1. R Square

Didapatkan r square sebesar 0.964822, artinya sebesar 96.48 % variable dependent telah dijelaskan oleh variable independent. Dan sisanya sebesar 3.52 % variable dependent dijelaskan oleh variable diluar model.

2. Uji F

Ho : Tidak ada pengaruh secara bersama antara variable independent terhadap variable dependent

Ha : Ada pengaruh secara bersama antara variable independent terhadap variable dependent

Didapatkan nilai probabilitas f statistic sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak Ho. Kesimpulannya adalah ada pengaruh secara bersama antara variable independent terhadap variable dependent

3. Uji T

Ho : Tidak ada pengaruh secara individu antara variable independent terhadap variable dependent

Ha : Ada pengaruh secara individu antara variable independent terhadap variable dependent

a) PDRB Perkapita

Didapatkan probabilitas sebesar 0.0001, nilai ini lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak Ho, Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara individu antara PDRB Perkapita dengan jumlah penduduk miskin.

b) Tingkal Melek Huruf

Didapatkan probabilitas sebesar 0.0000, nilai ini lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara individu antara tingkat melek huruf dengan jumlah penduduk miskin.

c) Akses Sumber Air Minum Layak

Didapatkan probabilitas sebesar 0.0006, nilai ini lebih besar daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara individu antara akses sumber air minum layak dengan jumlah penduduk miskin.

4. Interpretasi

$$Pit = 677546.6 - 6419.803Y1 - 4737.128Eit - 901.2228Hit$$

- a. Ketika variable PDRB Perkapita, Angka Melek Huruf dan Akses Sumber Air minum layak memiliki nilai nol, maka jumlah total nilai jumlah penduduk miskin adalah 677546.6 jiwa.
- b. Ketika variable PDRB Perkapita mengalami kenaikan sebesar satu juta rupiah dan diasumsikan variable independent yang lain bernilai konstan, maka Jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 6419.803 jiwa.
- c. Ketika variable Tingkat Melek Huruf mengalami kenaikan sebesar satu persen dan diasumsikan variable independent yang lain bernilai

konstan, maka Jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 4737.128 jiwa.

- d. Ketika variable Akses Sumber Air minum layak mengalami kenaikan sebesar satu persen dan diasumsikan variable independent yang lain bernilai konstan, maka Jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 901.2228 jiwa.

4.2.2 Regresi Data Yang Menggunakan Pendapatan Per Pekerja

4.2.2.1 Hasil Regresi Model Common, Fixed dan Random Effect

Tabel 4.13 Common Effect (Pendapatan Per Pekerja)

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/21 Time: 21:22

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	900165.6	110816.5	8.123028	0.0000
Pendapatan_Per_Pekerja	-340.3886	761.8543	-0.446790	0.6554
Angka_Melek_Huruf	-5401.354	1293.392	-4.176115	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-3823.639	374.6376	-10.20624	0.0000
R-squared	0.476445	Mean dependent var		157080.0
Adjusted R-squared	0.469927	S.D. dependent var		92571.78
S.E. of regression	67397.90	Akaike info criterion		25.09081
Sum squared resid	1.09E+12	Schwarz criterion		25.14797
Log likelihood	-3069.624	Hannan-Quinn criter.		25.11383
F-statistic	73.10474	Durbin-Watson stat		0.175347
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 4.14 Fixed Effect (Pendapatan Per Pekerja)

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel Least Squares

Date: 01/06/21 Time: 21:23

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	664634.5	81034.65	8.201856	0.0000
Pendapatan_Per_Pekerja	-3611.717	830.1465	-4.350698	0.0000
Angka_Melek_Huruf	-4551.341	954.1610	-4.769993	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-884.3644	252.1127	-3.507813	0.0006

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.965417	Mean dependent var	157080.0
Adjusted R-squared	0.959236	S.D. dependent var	92571.78
S.E. of regression	18690.44	Akaike info criterion	22.65108
Sum squared resid	7.23E+10	Schwarz criterion	23.19413
Log likelihood	-2736.757	Hannan-Quinn criter.	22.86976
F-statistic	156.1785	Durbin-Watson stat	0.871889
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 4.15 Random Effect (Pendapatan Per Pekerja)

Dependent Variable: JUMLAH_PENDUDUK_MISKIN

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/06/21 Time: 21:23

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 245

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	676475.8	79179.09	8.543617	0.0000
Pendapatan_Per_Pekerja	-3254.977	763.7577	-4.261793	0.0000
Angka_Melek_Huruf	-4589.139	922.7516	-4.973320	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-1069.584	244.1670	-4.380544	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			65900.29	0.9256
Idiosyncratic random			18690.44	0.0744
Weighted Statistics				
R-squared	0.382001	Mean dependent var		16742.61
Adjusted R-squared	0.374309	S.D. dependent var		24047.64
S.E. of regression	19021.84	Sum squared resid		8.72E+10
F-statistic	49.65618	Durbin-Watson stat		0.756815
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.347438	Mean dependent var		157080.0
Sum squared resid	1.36E+12	Durbin-Watson stat		0.048366

4.2.2.2 Pemilihan Model Yang Tepat

4.2.2.2.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk memilih antara model common effect dengan model fixed effect.

H_0 = Tidak ada perbedaan dalam intercept (Model common effect)

H_a = Terdapat perbedaan dalam intercept (Model fixed effect)

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (p-value) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai Prob. $< \alpha$ (0.10) maka menolak H_0 , artinya model fixed effect yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai Prob. $> \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H_0 , artinya model common effect yang tepat.

Tabel 4.16 Uji Chow (Pendapatan Per Pekerja)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FIXED_PENDAPATAN_NONLOG
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	86.082201	(34,207)	0.0000
Cross-section Chi-square	665.733884	34	0.0000

Didapatkan nilai probabilitas cross section f sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect.

4.2.2.2 Uji Langrange Multiplier

Tabel 4.17 Uji Langrange Multiplier (Pendapatan Per Pekerja)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	547.6028 (0.0000)	2.524853 (0.1121)	550.1277 (0.0000)
Honda	23.40092 (0.0000)	-1.588978 (0.9440)	15.42337 (0.0000)
King-Wu	23.40092 (0.0000)	-1.588978 (0.9440)	7.598170 (0.0000)
Standardized Honda	24.79293 (0.0000)	-1.425689 (0.9230)	12.40702 (0.0000)
Standardized King-Wu	24.79293 (0.0000)	-1.425689 (0.9230)	4.946790 (0.0000)
Gourieroux, et al.*	--	--	547.6028 (0.0000)

Didapatkan hasil cross section breusch pagan sebesar 0.000, nilai tersebut lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak Ho. Kesimpulannya adalah model yang tepat untuk digunakan adalah random effect.

4.2.2.2.3 Uji Hausman

Berdasarkan hasil dari uji chow bahwa model yang tepat merupakan model fixed effect, maka langkah selanjutnya yaitu memilih antara model random effect dengan model fixed effect menggunakan uji hausman.

H_0 = Model random effect

H_a = Model fixed effect

Dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (p-value) untuk menentukan manakah model yang tepat untuk analisis pada penelitian ini. Apabila nilai $\text{Prob.} < \alpha$ (0.10) maka menolak H_0 , artinya model fixed effect yang tepat. Sebaliknya, apabila nilai $\text{Prob.} > \alpha$ (0.10) maka gagal menolak H_0 , artinya model random effect yang tepat.

Tabel 4.18 Uji Hausman (Pendapatan Per Pekerja)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: RANDOM_PENDAPATAN_NONLOG
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.622133	3	0.0088

Didapatkan hasil cross section random sebesar 0.0088, nilai tersebut lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect.

4.2.2.2.4 Uji Statistika dengan Model Fixed Effect

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{2it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 H_{it} + \mu_{it}$$

4.2.2.2.5 Hasil Regresi Fixed Effect

Berdasarkan dari pengujian uji chow, uji langrange multiplier dan uji haustman, model regresi yang paling tepat untuk digunakan adalah menggunakan regresi fixed effect.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	664634.5	81034.65	8.201856	0.0000
Pendapatan_Per_Pekerja	-3611.717	830.1465	-4.350698	0.0000
Angka_Melek_Huruf	-4551.341	954.1610	-4.769993	0.0000
Akses_Sumber_Air_Layak	-884.3644	252.1127	-3.507813	0.0006
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.965417	Mean dependent var	157080.0	
Adjusted R-squared	0.959236	S.D. dependent var	92571.78	
S.E. of regression	18690.44	Akaike info criterion	22.65108	
Sum squared resid	7.23E+10	Schwarz criterion	23.19413	
Log likelihood	-2736.757	Hannan-Quinn criter.	22.86976	
F-statistic	156.1785	Durbin-Watson stat	0.871889	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Regresi

1. R Square

Didapatkan r square sebesar 0.965417, artinya sebesar 96.54 % variable dependent telah dijelaskan oleh variable independent. Dan sisanya sebesar 3.46 % variable dependent dijelaskan oleh variable diluar model.

2. Uji F

Ho : Tidak ada pengaruh secara bersama antara variable independent terhadap variable dependent

Ha : Ada pengaruh secara bersama antara variable independent terhadap variable dependent

Didapatkan nilai probabilitas f statistic sebesar 0.000, nilai ini lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak Ho. Kesimpulannya adalah ada pengaruh secara bersama antara variable independent terhadap variable dependent

3. Uji T

Ho : Tidak ada pengaruh secara individu antara variable independent terhadap variable dependent

Ha : Ada pengaruh secara individu antara variable independent terhadap variable dependent

a) Pendapatan Per Pekerja

Didapatkan probabilitas sebesar 0.0000, nilai ini lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak Ho, Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara individu antara Pendapatan per pekerja dengan jumlah penduduk miskin.

b) Tingkal Melek Huruf

Didapatkan probabilitas sebesar 0.0000, nilai ini lebih kecil daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara individu antara tingkat melek huruf dengan jumlah penduduk miskin.

c) Akses Sumber Air Minum Layak

Didapatkan probabilitas sebesar 0.0006, nilai ini lebih besar daripada alpha (5%) sehingga hipotesisnya adalah menolak H_0 . Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh secara individu antara akses sumber air minum layak dengan jumlah penduduk miskin.

4. Interpretasi

$$Pit = 664634.5 - 3611.717Y_{2it} - 4551.341E_{it} - 884.3644Hit$$

- a. Ketika variable Pendapatan Per Pekerja, Angka Melek Huruf dan Akses Sumber Air minum layak memiliki nilai nol, maka jumlah total nilai jumlah penduduk miskin adalah 664634.5 jiwa.
- b. Ketika variable Pendapatan Per Pekerja mengalami kenaikan sebesar satu juta rupiah dan diasumsikan variable independent yang lain bernilai konstan, maka Jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 3611.717 jiwa.
- c. Ketika variable Angka Melek Huruf mengalami kenaikan sebesar satu persen dan diasumsikan variable independent yang lain bernilai konstan,

maka Jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 4551.341 jiwa.

- d. Ketika variable Akses Sumber Air minum layak mengalami kenaikan sebesar satu persen dan diasumsikan variable independent yang lain bernilai konstan, maka Jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 884.3644 jiwa.

4.3 Pembahasan

Pembahasan untuk membahas prngaruh pendidikan, PDRB, dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin yang mengacu pada hasil uji estimasi model fixed effect.

4.3.1 Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan dari hasil regresi model fixed effect pada table 4.7 dan 4.14, Tingkat Angka Melek Huruf mempunyai pengaruh negative secara sigmifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dengan koefisien regresinya sebesar 4737.128 pada PDRB Perkapita dan sebesar 4551.341 pada Pendapatan Per Pekerja. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa ketika Tingkat Angka Melek Huruf mengalami kenaikan sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 4737.12 jiwa pada PDRB Perkapita dan sebesar 4551.34 jiwa pada Pendapatan Per Pekerja, dan sebaliknya jika Tingkat Angka Melek Huruf mengalami penurunan sebesar satu persen maka jumlah penduduk

miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 4737.12 jiwa pada PDRB Perkapita dan sebesar 4551.34 jiwa pada Pendapatan Per Pekerja. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang telah diungkapkan oleh Amartya Sen, ketika masyarakat memiliki modal pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman dalam mencari pekerjaan maupun untuk mendapat gaji yang lebih baik dengan tingkatan pendidikan yang tinggi. Dengan lebih banyaknya masyarakat yang dapat mendapatkan kerja dan memperoleh gaji yang lebih tinggi sesuai dengan pendidikannya maka secara langsung akan menaikkan produktivitas dan pendapatan negara sehingga angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin akan turun pula. Begitu juga dengan teori yang diungkapkan Simmon di dalam Todaro dan Smith (2006), dimana pendidikan sebagai penyelamat diri dari kemiskinan karena pendidikan menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesempatan kerja serta sebagai komponen penting dalam peningkatan kapasitas mutu pembangunan (Wahyudi, 2011). Dengan menggunakan Tingkat Melek Huruf akan menunjukkan bahwa, semakin tinggi Tingkat melek huruf maka menunjukkan bahwa system Pendidikan dasar dan program keaksaraan yang telah diterapkan telah berjalan dengan efektif dan efisien yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-

kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran baik secara formal maupun non formal.

4.3.2 PDRB dan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan dari hasil regresi model fixed effect pada table 4.7 dan 4.14, PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja memiliki pengaruh negative secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dengan koefisien regresinya masing-masing sebesar 6419.803 dan 3611.717. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa ketika PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja mengalami kenaikan sebesar satu juta rupiah maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 6419.80 jiwa dan 3611.71 jiwa, dan sebaliknya jika PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja mengalami penurunan sebesar satu juta rupiah maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 6419.80 jiwa dan 3611.71 jiwa. Hal ini sesuai dengan landasan teori lingkaran kemiskinan yang dicantumkan oleh Nurkse, yang menjelaskan bahwa masyarakat menjadi miskin karena memiliki pendapatan yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas rendah akan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menabung sehingga investasi atau modal menjadi rendah, hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat meningkatkan produktivitasnya dan begitu seterusnya. Begitu juga dari pernyataan Thamrin (2001) yang menyimpulkan bahwa semakin besar PDRB

suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.

4.3.3 Kesehatan dan Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan dari hasil regresi model fixed effect pada table 4.7 dan 4.14, Akses Sumber Air Layak mempunyai pengaruh negative secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dengan koefisien regresinya sebesar 901.2228 pada PDRB Perkapita dan sebesar 884.3644 pada Pendapatan Per Pekerja. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa ketika Akses Sumber Air Layak mengalami kenaikan sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami penurunan sebesar 901.22 jiwa pada PDRB Perkapita dan sebesar 884.36 jiwa pada Pendapatan Per Pekerja, dan sebaliknya jika Akses Sumber Air Layak mengalami penurunan sebesar satu persen maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah akan mengalami kenaikan sebesar 901.22 jiwa pada PDRB Perkapita dan sebesar 884.36 jiwa pada Pendapatan Per Pekerja. Hal tersebut karena berhubungan dengan produktivitas masyarakat di wilayah tersebut, jika akses sumber air layak yang dimiliki suatu wilayah meningkat sehingga kemungkinan masyarakat untuk terkena penyakit akan semakin menurun yang mengakibatkan tidak ada gangguan dalam menjalani pekerjaan masyarakat tersebut. Masyarakat yang sehat kemudian akan dapat menjalankan pekerjaan lebih giat dan lancar sehingga produktivitasnya akan

meningkat dan dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang kemudian dapat menjauhkan mereka masuk ke kategori penduduk miskin.

Hal ini sesuai dengan landasan teori yang telah dicantumkan pada penelitian ini, Lincoln (1999), dimana ia menjelaskan bahwa perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin dengan adanya peningkatan daya kerja, mengurangi hari tidak kerja dan menaikkan output energi. Oleh karena itu intervensi dalam perbaikan kesehatan masyarakat oleh pemerintah menjadi alat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan.

Lalu berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Oni Triono (2018 : 93-106) dapat disimpulkan bahwa akses air bersih memiliki pengaruh pada produktivitas masyarakat di Surabaya. Ketika masyarakat memiliki akses yang buruk terhadap air bersih dapat menyebabkan penyakit terutama diare, dimana hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya waktu kerja sehingga terjadinya penurunan produktivitas yang berujung pada turunnya pendapatan suatu daerah tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

4.3.4 Perbandingan Antara Persamaan Y1 dengan Y2.

Berdasarkan nilai R^2 pada table hasil regresi model fixed effect pada table 4.7 dan 4.14, Pendapatan Per Pekerja memiliki tingkat signifikansi terhadap jumlah penduduk lebih besar dengan nilai 96,54% daripada tingkat signifikansi PDRB Perkapita dengan nilai 96,48%. Hal ini dikarenakan

PDRB Non Migas yang penulis gunakan merupakan gambaran pendapatan yang murni dihasilkan oleh seluruh pekerja, sehingga pendapatan per pekerja menjadi lebih cocok untuk menjelaskan pengaruh PDRB Non Migas dibandingkan dengan PDRB Perkapita, dimana PDRB tersebut dibagikan ke seluruh masyarakat baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Hal tersebut disangkutpautkan pada teori produktivitas tenaga kerja, dimana angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin hanya akan berkurang ketika produktivitas tenaga kerja itu naik sehingga dapat menghasilkan output besar yang dapat dinikmati secara individu dalam bentuk gaji atau upah, sedangkan pada PDRB Perkapita, ketika terjadi kenaikan PDRB, tidak semua masyarakat dapat menikmatinya dengan adil terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya disparitas pendapatan yang tinggi sehingga adanya kenaikan PDRB belum tentu akan membebaskan masyarakat dari label penduduk miskin bila sebagian besar masyarakat tidak dapat menghasilkan output atau meningkatkan produktivitasnya.

الجمعة، الأستد الأندو
الجمعة، الأستد الأندو

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Tingkat Angka Melek Huruf Umur 15 Tahun Keatas memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin.
2. PDRB Perkapita dan Pendapatan Per Pekerja memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin.
3. Akses Sumber Air Minum Layak memiliki pengaruh negative terhadap jumlah penduduk miskin.
4. Secara bersama-sama, variable Angka Melek Huruf, PDRB per kapita dan Pendapatan per pekerja, dan Akses Sumber Air Minum Layak berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah.
5. Diantara PDRB Perkapita dengan Pendapatan Per Pekerja, Pendapatan Per Pekerja memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar daripada PDRB Perkapita.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah

1. Untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dapat menerapkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan baik dan kesehatan seperti meningkatkan efektivitas pendidikan dan jangkauan akses-

akses sarana yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat (misal: sanitasi layak, sumber air minum layak, puskesmas, rumah sakit dan lain-lain.) sehingga masyarakat Jawa Tengah dapat menjadi SDM yang berkualitas baik dan dapat bersaing.

2. Pemerintah perlu memiliki database kemiskinan yang lebih valid agar Negara dapat lebih tepat sasaran dalam menangani pengentasan kemiskinan.
3. Meratakan fasilitas dan layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Tengah agar guna untuk menurunkan disparitas atau ketimpangan dalam segi kualitas SDM yang tersedia di daerah masing-masing, sehingga seluruh masyarakat Jawa Tengah memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, K.P. 2018. *Analisis Determinan Keparahan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2011-2015*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Amar, S. Satrianto, A. & Ariusni. Pengaruh Kondisi Kesehatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat. *Jurnal Kesehatan Medika Sainika* : Volume 10 Nomor. Universitas Negeri Padang.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*. (E. Risanto, Ed.). Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Anggraini, N. 2012. *Hubungan Kausalitas dari Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ari, W. 2010. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004 –2008*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Arief, D., & Yundi, H. 2010. *Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi*. IPB Press.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jakarta : Badan Pusat Statistika.

Badan Pusat Statistik. 2009. *Jawa Tengah Dalam Angka 2009*. Jawa Tengah: BPS.

Badan Pusat Statistik. *Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten*. Diakses tanggal 20 Oktober 2020. Dapat diakses di <https://jateng.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. *Angka Melek Huruf Diatas Umur 15 Tahun Menurut Kabupaten*. Diakses tanggal 20 Oktober 2020. Dapat diakses di <https://jateng.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. *Angka Melek Huruf*. Diakses tanggal 12 November 2020. Dapat diakses di <https://sirusa.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. *Angka Melek Huruf*. Diakses tanggal 12 November 2020. Dapat diakses di <https://sirusa.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)*. Diakses tanggal 20 Oktober 2020. Dapat diakses di <https://jateng.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur*. Diakses tanggal 20 Oktober 2020. Dapat diakses di <https://jateng.bps.go.id/>

- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi*. Diakses tanggal 5 November 2020. Dapat diakses di <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Perkapita*. Diakses tanggal 12 November 2020. Dapat diakses di <https://sirusa.bps.go.id/>
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data (3 ed.)*. England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Bappenas. 2009. *Data Kemiskinan Indonesia tahun 2009*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses Tanggal 26 Februari 2021. Dapat diakses di : www.bappenas.go.id.
- Bhargava, A., Jamison, D., Lau, L., & Murray, C. 2001. Modeling the Effects of Health on Economic Growth. *Journal of Health Economics*. Vol. 20. No. 3.423–440.
- Bloom, David E & David Canning. 2003. Health as Human Capital and its Impact on Economic Performance. *The Geneva Papers on Risk and Insurance*. Vol. 28 No. 2.304-315.
- Chandra, Shekhar Kumar. 2006. Human Capital and Growth Empirics. *The Journal of Developing Areas*. Vol. 40. No. 1.153-179.

- Chriswardani, S. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Vol 8/No.03/september/2005. Hal: 121-129. Diakses pada Tanggal 25 Februari 2021. Dapat diakses di <http://www.jmpk-online.net>.
- Dicky, W. dan Tri. W. 2013. Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Economics* 2, (1) (2013),
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivarians dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. Newyork : McGraw-Hill.
- Hermanto S., dan Dwi W. 2006. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia: Proses Pemerataan dan Pemiskinan. *Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian*. Bogor.
- Hermanto S., dan Dwi W. 2007. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Paper Ekonomi, Jakarta.
- Hermanto S., dan Dwi W. 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Diakses Tanggal 26 Februari 2021. Dapat diakses di : <http://pse.litbang.deptan.go.id>.

- Hsaio, C. 2003. *Analysis of Panel Data*. New York : Cambridge University Press.
- Juanita. 2002. *Kesehatan dan Pembangunan Nasional*. Universitas Sumatera Utara.
Diakses Tanggal 26 Februari 2021. Dapat diakses di
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/3737>
- Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kajian Fiskal Regional Tahun 2019. Diakses pada tanggal 23 Januari 2021. Dapat diakses di
<https://djpb.kemenkeu.go.id/>
- Kincaid, J.C. 1975. *Poverty and Equality in Britain*. Harmondsworth : Penguin.
- Kumalasari, M. 2011. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata - Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta : YKPN.
- La, O.M. 2019. *Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa*

Timur (Periode Tahun 2010 – 2017). Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Ni, M.S. dan Samsubar, S. 2016. Akses Air Bersih di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9 No. 2. ISSN : 2301 – 8968

Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Novita, I, Sari. 2018. Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2014. *Economics Development Analysis Journal*, 7 (2) (2018). ISSN 2252-6965.

Nurkse, Ragnar. 1953. *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Oxford University Press.

Permana, A.Y. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah 2004-2009*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Prima, S. 2011. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : Universitas Diponegoro.

- Ravi, D.W. 2010. *Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sa'diyah, Y.H dan Arianti, F. 2012. *Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Kemiskinan Yang Mempengaruhi di Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Sach, Jeffrey D. 2005. *The End of Poverty*. New York : Penguin Press.
- Safuridar dan Maya, D. 2018. Analisis Pengaruh Pendidikan dan PDRB per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 9, No 2 Juli 2018. E-ISSN 2614-1523.
- Sajogyo, 1977. *Golongan Miskin dan Partisipasinya Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Prisma No.3 Tahun ke-IV. LP3ES.
- Satria, D. Analisis Regresi : Model Data Panel. Diakses tanggal 23 Januari 2021.
Dapat diakses di <https://www.diassatria.com/>
- Sen, Amartya Kumar. 2000. *Development as Freedom*. New York : Anchor Books.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suharno. 2008. *Metode Pengukuran Kemiskinan: Garis Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta.
- Suryabrata, S. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Thamrin, S. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C.. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1 dan Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan*. Erlangga : Jakarta.
- Trioni, M.O. 2018. *Akses Air Bersih Pada Masyarakat Kota Surabaya Serta Dampak Buruknya Akses Air Bersih Terhadap Produktivitas Masyarakat Kota Surabaya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.
- United Nations. 1961. *International Definition and Measurement of Level of Living : An Interim Guide*. New York : United Nation Publication.

- Ustama, D.D. 2009. *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Wahyudi. 2011. *Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009)*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Ekonesia.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Jawa Tengah. Diakses tanggal 10 Januari 2021. Dapat diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
- World Bank. *Indonesia Database for Policy and Economic Research*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020. Dapat diakses di <https://datacatalog.worldbank.org/>
- Yudha, O. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Lampiran I. Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa) di Indonesia Menurut Provinsi

Tahun 2019.

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)
Aceh	809,76
Sumatera Utara	1260,5
Sumatera Barat	343,09
Riau	483,92
Jambi	273,37
Sumatera Selatan	1067,16
Bengkulu	298
Lampung	1041,48
Kep. Bangka Belitung	67,37
Kep. Riau	127,76
DKI Jakarta	362,3
Jawa Barat	3375,89
Jawa Tengah	3679,4
DI Yogyakarta	440,89
Jawa Timur	4056
Banten	641,42
Bali	156,91
Nusa Tenggara Barat	705,68
Nusa Tenggara Timur	1129,46
Kalimantan Barat	370,47
Kalimantan Tengah	131,24
Kalimantan Selatan	190,29
Kalimantan Timur	220,91
Kalimantan Utara	48,61
Sulawesi Utara	188,6
Sulawesi Tengah	404,03
Sulawesi Selatan	759,58
Sulawesi Tenggara	299,97

Gorontalo	184,71
Sulawesi Barat	151,87
Maluku	319,51
Maluku Utara	87,18
Papua Barat	207,59
Papua	900,95
Indonesia	24785,9

Lampiran II. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
Kab. Cilacap	243,5
Kab. Banyumas	285,9
Kab. Purbalingga	176,5
Kab. Banjarnegara	165,4
Kab. Kebumen	241,9
Kab. Purworejo	101,2
Kab. Wonosobo	166,4
Kab. Magelang	162,4
Kab. Boyolali	120
Kab. Klaten	172,3
Kab. Sukoharjo	79,9
Kab. Wonogiri	123
Kab. Karanganyar	106,4
Kab. Sragen	130,4
Kab. Grobogan	184,5
Kab. Blora	115
Kab. Rembang	119,1
Kab. Pati	147,1
Kab. Kudus	64,1
Kab. Jepara	100,6
Kab. Demak	160,9

Kab. Semarang	81,2
Kab. Temanggung	87,5
Kab. Kendal	109,3
Kab. Batang	83,5
Kab. Pekalongan	112,1
Kab. Pemasang	235,5
Kab. Tegal	143,5
Kab. Brebes	352
Kota Magelang	10,9
Kota Surakarta	55,7
Kota Salatiga	10,6
Kota Semarang	84,3
Kota Pekalongan	24,1
Kota Tegal	20,3

Lampiran III. PDRB (Juta Rupiah) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rupiah)
Kab. Cilacap	95.254.586,70
Kab. Banyumas	35.147.313,30
Kab. Purbalingga	15.612.285,90
Kab. Banjarnegara	13.663.266,65
Kab. Kebumen	17.794.789,30
Kab. Purworejo	12.023.780,44
Kab. Wonosobo	12.436.048,84
Kab. Magelang	20.974.801,01
Kab. Boyolali	20.248.849,44
Kab. Klaten	24.993.103,27
Kab. Sukoharjo	24.163.939,48
Kab. Wonogiri	18.818.939,39
Kab. Karanganyar	23.731.952,05
Kab. Sragen	23.977.207,30

Kab. Grobogan	17.659.254,29
Kab. Blora	16.866.640,78
Kab. Rembang	12.220.172,17
Kab. Pati	27.612.445,94
Kab. Kudus	68.821.162,19
Kab. Jepara	19.055.335,81
Kab. Demak	16.584.124,32
Kab. Semarang	32.002.984,99
Kab. Temanggung	13.776.254,81
Kab. Kendal	27.649.777,07
Kab. Batang	13.667.079,80
Kab. Pekalongan	14.679.128,72
Kab. Pemasang	16.336.984,00
Kab. Tegal	22.322.100,13
Kab. Brebes	29.509.206,81
Kota Magelang	5.820.532,00
Kota Surakarta	31.685.480,46
Kota Salatiga	8.624.240,98
Kota Semarang	123.279.891,91
Kota Pekalongan	6.706.278,70
Kota Tegal	10.006.943,00

Lampiran IV. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun Keatas (Persen) di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun Keatas (Persen)
Kab. Cilacap	94,21
Kab. Banyumas	96,13
Kab. Purbalingga	93,32
Kab. Banjarnegara	92,18
Kab. Kebumen	94,21
Kab. Purworejo	93,6

Kab. Wonosobo	93,88
Kab. Magelang	94,63
Kab. Boyolali	90,43
Kab. Klaten	92,61
Kab. Sukoharjo	93,66
Kab. Wonogiri	89,61
Kab. Karanganyar	91,23
Kab. Sragen	86,46
Kab. Grobogan	92,73
Kab. Blora	87,33
Kab. Rembang	92,35
Kab. Pati	91,89
Kab. Kudus	94,58
Kab. Jepara	95,45
Kab. Demak	95,29
Kab. Semarang	93,91
Kab. Temanggung	94,24
Kab. Kendal	93,46
Kab. Batang	93,47
Kab. Pekalongan	93,47
Kab. Pemasang	93,22
Kab. Tegal	92,96
Kab. Brebes	91,17
Kota Magelang	97,99
Kota Surakarta	97,58
Kota Salatiga	97,71
Kota Semarang	98,13
Kota Pekalongan	97,65
Kota Tegal	96,99

Lampiran V. Akses Sumber Air Minum Layak (Persen) di Provinsi Jawa Tengah

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Akses Sumber Air Minum Layak (Persen)
Kab. Cilacap	75
Kab. Banyumas	63,44
Kab. Purbalingga	67,82
Kab. Banjarnegara	59,24
Kab. Kebumen	67,4
Kab. Purworejo	66,52
Kab. Wonosobo	87,78
Kab. Magelang	71,79
Kab. Boyolali	71,26
Kab. Klaten	73,06
Kab. Sukoharjo	79,85
Kab. Wonogiri	66,16
Kab. Karanganyar	78,22
Kab. Sragen	82,08
Kab. Grobogan	58,44
Kab. Blora	79,99
Kab. Rembang	86,82
Kab. Pati	76,23
Kab. Kudus	73,24
Kab. Jepara	67,76
Kab. Demak	74,42
Kab. Semarang	85,68
Kab. Temanggung	84,75
Kab. Kendal	78
Kab. Batang	66,62
Kab. Pekalongan	73,85
Kab. Pemasang	63,08
Kab. Tegal	69,05
Kab. Brebes	64,84

Kota Magelang	94,26
Kota Surakarta	84,5
Kota Salatiga	86,11
Kota Semarang	94,86
Kota Pekalongan	82,17
Kota Tegal	98,26

Lampiran VI. PDRB Non Migas Berdasarkan Harga Konstan Di Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)

Wliayah	PDRB Non Migas Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab. Cilacap	11140846	11689093	12302860	12998130	24702780	25452060	26065800
Kab. Banyumas	3958646	4171469	4400540	4654630	4931430	5221520	5571940
Kab. Purbalingga	2143746,2	2257392,8	2390240	2525870	2678090	2845660	3006630
Kab. Banjarnegara	2495785,8	2619989,6	2753940	2888520	3030540	3189650	3357170
Kab. Kebumen	2572062,9	2721254,1	2828400	2945830	3070380	3242110	3378160
Kab. Purworejo	2591535,4	2737087,1	2872720	3016600	3168110	3327670	3493600
Kab. Wonosobo	1679149,6	1741148,3	1811090	1888810	1974110	2075560	2179020
Kab. Magelang	3582647,6	3761388,6	3938760	4116390	4292350	4542890	4797320
Kab. Boyolali	3748102,1	3899372,9	4100520	4248050	4472220	4725560	4982070
Kab. Klaten	4394688	4567201	4761020	4843250	4938050	5211760	5513310
Kab. Sukoharjo	4330992,9	4540751,5	4756900	4978260	5206690	5468710	5742880
Kab. Wonogiri	2657068,9	2770435,8	2901580	3071960	3140860	3325090	3470050
Kab. Karanganyar	4654054,5	4900690,4	5172270	5452440	5752140	6086880	6414500
Kab. Sragen	2582492,5	2729450,3	2893430	3069750	3270050	3485990	3717490
Kab. Grobogan	2799700,5	2948793,8	3097090	3253400	3370340	3578060	3742250
Kab. Blora	1811864	1913763,4	2010910	2115370	2241690	2354440	2472180
Kab. Rembang	1999951,2	2093412,6	2186740	2283970	2384460	2500800	2626480
Kab. Pati	3966062,2	4162082,4	4357140	4579850	4828720	5114680	5407170
Kab. Kudus	11242693	11683820	12144950	12651590	13184050	13754590	14398650
Kab. Jepara	3722677,8	3889988,9	4085440	4270260	4502690	4763310	5038100
Kab. Demak	2677366,8	2787524	2901150	3020820	3156130	3302610	3455270
Kab. Semarang	4871444,3	5079003,7	5300720	5560550	5869950	6223190	6573210

Kab. Temanggung	2143221,2	2219155,6	2309840	2409390	2521440	2648490	2781320
Kab. Kendal	4625437,3	4822465,3	5090290	5394080	5717090	6033630	6350000
Kab. Batang	2092973,9	2169854,5	2250620	2362480	2486770	2611530	2746480
Kab. Pekalongan	2834685	2970215	3098070	3230350	3384390	3564600	3758990
Kab. Pemasang	2993296,8	3142808,7	3293060	3455710	3622640	3813840	4020040
Kab. Tegal	3120395,6	3286263,4	3460130	3627200	3801780	4001200	4233510
Kab. Brebes	4769145,5	4998528,2	5247900	5507400	5780880	6082270	6390180
Kota Magelang	946063,73	993835,2	1044650	1108600	1169340	1245160	1318710
Kota Surakarta	4304287,4	4549343	4817880	5103890	5411910	5742860	6080950
Kota Salatiga	792680,44	832154,88	869450	913020	961020	1018100	1080660
Kota Semarang	18142640	19156814	20180580	21365820	22736140	24196490	25697340
Kota Pekalongan	1820001,2	1887853,7	1978080	2087110	2200830	2324150	2460950
Kota Tegal	1109438,2	1166587,9	1225100	1281530	1340230	1408140	1477510



Lampiran VII. Jumlah Populasi Provinsi Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota

(Jiwa)

Wliayah	Jumlah Populasi (Jiwa)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab Cilacap	1623176	1626795	1629908	1642107	1655668	1666192	1676098
Kab Banyumas	1495981	1503262	1510102	1554527	1574002	1589930	1605585
Kab Purbalingga	821870	828125	834164	848952	860725	870423	879880
Kab Banjarnegara	864148	869777	875167	868913	877201	883710	889894
Kab Kebumen	1208716	1215801	1222542	1159926	1166989	1171998	1176622
Kab Purworejo	719396	722293	724973	695427	699682	702678	705527
Kab Wonosobo	754447	757746	760819	754883	760828	765113	769396
Kab Magelang	1161278	1170894	1180217	1181723	1196895	1209486	1221673
Kab Boyolali	932698	938469	943978	930531	939020	945511	951809
Kab Klaten	1128852	1133012	1136829	1130047	1137973	1143676	1149002
Kab Sukoharjo	819621	826699	833575	824238	833915	841773	849392
Kab Wonogiri	980132	982730	985024	928904	934616	938704	942430
Kab Karanganyar	805462	812423	819186	813196	823511	831891	840199
Kab Sragen	857844	860509	862910	858266	863977	868090	871991
Kab Grobogan	1326414	1336322	1345879	1308696	1319822	1328183	1336317
Kab Blora	831909	835160	838159	829728	835785	840193	844325
Kab Rembang	572879	575640	578232	591359	598087	603573	608891
Kab Pati	1167621	1171605	1175232	1190993	1201801	1210001	1217930
Kab Kudus	774838	786269	797617	777437	789875	800403	810893
Kab Jepara	1073631	1090839	1107973	1097280	1117784	1135628	1153321
Kab Demak	1025388	1034286	1042932	1055579	1070307	1082498	1094495
Kab Semarang	900420	911223	921865	930727	946774	960497	974115
Kab Temanggung	700845	707707	714411	708546	717402	724688	731927
Kab Kendal	938115	952011	965808	900313	910494	918798	926791
Kab Batang	678909	682561	686016	706764	715506	722596	729591
Kab Pekalongan	844228	851700	858967	838621	847390	854396	861125
Kab Pemasang	1358952	1375240	1391284	1261353	1269219	1274606	1279581
Kab Tegal	1410290	1415625	1420532	1394839	1403427	1409424	1414983
Kab Brebes	1775939	1788687	1800958	1733869	1746613	1756018	1764982
Kota Magelang	132177	134615	137055	118227	119003	119416	119879
Kota Surakarta	517557	522935	528202	499337	502873	505401	507798

Kota Salatiga	174699	178451	182226	170332	173377	175989	178719
Kota Semarang	1488645	1511236	1533686	1555984	1588511	1616494	1644374
Kota Pekalongan	273342	275241	277065	281434	285000	288001	290903
Kota Tegal	239860	240502	241070	239599	241326	242714	243901

Lampiran VIII. Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja di Provinsi Jawa Tengah

Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)

Wliayah	Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja (Jiwa)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kab Cilacap	717158	667795	689485	688049	797518	730839	755739
Kab Banyumas	663991	658221	680460	733609	761034	731435	723517
Kab Purbalingga	391558	381458	401829	418945	410082	460165	446831
Kab Banjarnegara	448081	435466	430667	452617	429193	496975	463016
Kab Kebumen	583982	541525	557099	537808	558785	618687	592723
Kab Purworejo	369993	340338	341263	341033	345383	349748	359116
Kab Wonosobo	386257	366045	380776	381326	369940	400856	366899
Kab Magelang	636038	592811	600436	629239	590807	645033	605206
Kab Boyolali	530864	505189	512634	506987	462374	508241	515349
Kab Klaten	584022	568190	577901	548672	564784	611156	610265
Kab Sukoharjo	426623	411496	414058	400526	411536	412921	416179
Kab Wonogiri	539364	525547	550876	495295	484858	518846	514664
Kab Karanganyar	434400	425444	417838	427435	407869	427462	435522
Kab Sragen	472881	449446	466332	463749	433620	471613	462756
Kab Grobogan	728345	662039	720700	688296	649149	710305	684286
Kab Blora	470679	432057	457502	441334	424989	448631	454632
Kab Rembang	295457	280904	302260	304638	300096	324204	320341
Kab Pati	608257	571512	590171	581998	603103	574466	611905
Kab Kudus	413132	415136	406909	394361	383399	426422	412764
Kab Jepara	538251	498129	533446	536754	527480	573128	559067
Kab Demak	529853	500484	494917	492570	505834	507125	507256
Kab Semarang	471179	473928	470675	502705	465735	530955	528560
Kab Temanggung	395799	367563	372741	396063	360636	407953	404083
Kab Kendal	529205	482124	489173	447120	446514	467860	467246
Kab Batang	348619	328391	322932	353214	347725	366290	359366
Kab Pekalongan	415685	393764	412482	401931	393783	416164	410144

Kab Pemasang	597939	546418	567795	515127	591728	592918	573469
Kab Tegal	668440	608179	590539	585618	654335	608585	592058
Kab Brebes	818710	759391	760430	812098	824449	748905	847055
Kota Magelang	55670	54554	56107	53719	58919	58542	59567
Kota Surakarta	260680	251101	246768	235998	249368	261022	266748
Kota Salatiga	76775	77273	78668	73329	83879	87321	88542
Kota Semarang	663053	658729	703602	724687	770886	795245	802747
Kota Pekalongan	125564	127853	133326	134984	131158	136948	135251
Kota Tegal	107554	105158	102585	107613	115187	104429	117091

